



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 dapat selesai dengan baik dan lancar sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan demi peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKjIP ini, dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2020. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang lebih sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Pamekasan, 30 Maret 2021

BUPATI PAMEKASAN**H. BADDRUT TAMAM, S.Psi**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Pada siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 adalah laporan kinerja tahun kedua dalam periode RPJMD tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 merupakan bukti akuntabilitas kinerja Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan selama tahun 2020 dengan memperlihatkan capaian yang telah ditargetkan di dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2020 melalui pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2020. Selain sebagai sarana penyampaian pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan kepada seluruh stakeholders, LKjIP Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 juga menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai input bagi Perencanaan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan diukur berdasarkan Penilaian terhadap indikator sasaran strategis yang disusun sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis isu-isu strategis dari 50 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 33 indikator atau 66% dalam kategori sangat berhasil. terdapat 5 indikator atau 2,5% dalam kategori berhasil. Indikator dalam ketegori cukup berhasil sebanyak 2 indikator atau 4%. dan terdapat 1 indikator atau 0,2% dalam kategori tidak berhasil. Sedangkan capaian indikator lainnya masih belum rilis. Adapun pencapaian kinerja untuk 17 sasaran yang ditetapkan pada setiap Misi. Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 Indikator sasaran: capaian indikator sasaran pada misi 1 dalam kategori sangat berhasil sebanyak 3 indikator sasaran atau 100%. Misi 2: Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya terdapat 2 tujuan, 8 sasaran dan 21 Indikator sasaran: capaian indikator sasaran pada misi 2 dalam kategori sangat berhasil sebanyak 13 indikator atau 61,90%. 4 indikator atau 19,04% Indikator sasaran dalam kategori berhasil. 3 indikator sasaran atau 14,28% dalam kategori cukup berhasil dan 1 indikator atau 4,76% dalam kategori tidak berhasil. Misi 3: Peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 9 indikator sasaran: Capaian indikator pada misi 3 terdapat 5 indikator atau 55,55% dalam kategori sangat berhasil, 1 indikator sasaran atau 11,11% dalam kategori berhasil dan indikator lainnya masih belum rilis. misi 4: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran 9 Indikator sasaran: capaian indikator sasaran pada misi 4 terdapat 6 Indikator atau 66,6% dalam kategori sangat berhasil dan capaian indikator lainnya masih belum rilis. misi 5: Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 8 indikator sasaran: terdapat 6 indikator sasaran atau 75% indikator dalam kategori sangat berhasil dan 1

indikator atau 2,5% dalam kategori berhasil. Sedangkan capaian indikator lainnya masih belum rilis.

Terhadap setiap indikator sasaran yang pencapaiannya masuk dalam kategori Berhasil, maka pemerintah Kabupaten Pamekasan akan selalu mengupayakan:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus mampu bersinergi dengan menjalankan tugas-tugas pelaksanaan SAKIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
- 2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi tim penyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian SAKIP di seluruh Perangkat Daerah, sehingga Laporan Kinerja (LKj) yang disusun tidak hanya tepat waktu tetapi juga berkualitas.
- 3) Dilakukan sinkronisasi dan *cascading* Indikator dan Target Kinerja di dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar dalam meningkatkan tertib perencanaan dan pengelolaan kinerja.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses implementasi SAKIP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementrian PAN dan RB.
- 5) Mengembangkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mampu mensinergikan seluruh kinerja Perangkat Daerah.

Melihat upaya penanganan permasalahan diatas, beberapa upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, tetapi perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Oleh karena itu setiap Aparatur diharapkan menjadi penggerak dalam penyelesaian masalah.

Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Terhadap pendukung capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab 3, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga dapat dilihat dari beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh dari pemerintah pusat, lembaga independen dan organisasi internasional, antara lain:

- 1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Judul Inovasi : Edukasi Sayuran Sehat Lahirkan Generasi Hebat (Es SELASIH) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- 2) Kabupaten Layak Pemuda 2019 yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 3) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI 6 Tahun berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- 4) Kepatuhan tertinggi dalam Pelayanan Publik.
- 5) Kabupaten terbaik se-Jawa Timur Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Ombudsman RI diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.
- 6) Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 7) Bupati *Entrepreneur Award* 2019 kategori Perdagangan diberikan oleh MarkPlus Inc.
- 8) Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- 9) Prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan status kinerja tertinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018.
- 10) BUMDes terbaik III dalam Lomba BUMDes Jawa Timur diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 11) *The Best on Communication* dalam Ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) Angkatan 5 dan 6 Tahun yang diberikan oleh SINDO Media.
- 12) IGA 2020 Kabupaten Sangat Inovatif dari Menteri Dalam Negeri diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
- 13) Kabupaten dengan Pelayanan Baik dan Menginspirasi di Masa Pandemi pada Ajang Anugerah “INDONESIA AWARD 2020” diberikan oleh I News.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima Kasih.

DAFRAT ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan.....	4
1.3.1 Letak Geografis Wilayah	4
1.3.2 Kondisi Demografi.....	13
1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan	14
1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan	18
1.4.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN).....	19
1.4.3 Sumberdaya Keuangan.....	24
1.5 Isu Strategis	28
1.6 Landasan Hukum.....	30
1.7 Sistematika Penyusunan LKJIP	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 Perencanaan Strategis	34
2.1.1 Visi	35
2.1.2 Misi	36
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	37
2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	45
2.2 Indikator Kinerja Utama	52

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	59
2.4 Perjanjian Kinerja.....	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	69
3.1 Pengukuran Kinerja 2020.....	70
3.2 Capaian Kinerja 2020.....	72
3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 2020	75
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020.....	155
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD.....	158
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional.....	161
3.2.5 Realisasi Anggaran.....	163
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran	166
BAB IV PENUTUP	169
4.1 PENUTUP.....	169
4.2 TINDAK LANJUT.....	171
LAMPIRAN	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	5
Tabel 1.2 Jumlah Desa pada Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	6
Tabel 1.3 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pamekasan.....	7
Tabel 1.4 Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kualitas Tahan di Kabupaten Pamekasan	9
Tabel 1.5 Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Tekstur Tanah di Kabupaten Pamekasan	10
Tabel 1.6 Nama, Panjang dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah	11
Tabel 1.7 Jumlah Sumber/Mata Air di Kabupaten Pamekasan.....	11
Tabel 1.8 Jumlah hari hujan tiap bulan di Kabupaten Pamekasan	12
Tabel 1.9 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan dan Rasio Jenis Kelamin penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	14
Tabel 1.10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 1.11 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020.....	24
Tabel 1.12 Perkembangan Belanja Kabupaten Pamekasan Periode Tahun 2016-2020	26
Tabel 1.13 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.....	27
Tabel 1.14 Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Kabupaten Pamekasan tahun 2020.....	29
Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya.....	35
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	40
Tabel 2.3 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan	45
Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran ...	47

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.....	51
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan	52
Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan 2020 Kabupaten Pamekasan	60
Tabel 2.8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	63
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	67
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	72
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	72
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan 1	75
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	76
Tabel 3.5 Program Pendukung Capaian Sasaran Strategis 1	78
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	79
Tabel 3.7 Program Pendukung Capaian Sasaran Strategis 2.....	80
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan 2	84
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	85
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	87
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	91
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah	93
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	94
Tabel 3.14 Pencapaian kinerja sasaran Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	96
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3.....	97
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	98
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan tahun 2020.....	99
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	101

Tabel 3.19 Pencapaian kinerja sasaran Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha.....	103
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	105
Tabel 3.21 capaian kinerja sasaran Pengembangan Potensi Wisata berbasis partisipasi masyarakat.....	106
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	108
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Iklim Investasi dan Kondusif	110
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Tujuan 4	111
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	112
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran Sumber-sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah.....	113
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Tujuan 5	115
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	115
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	118
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12.....	123
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik	124
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Tujuan 6.....	125
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13.....	125
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar.....	128
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14.....	132
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh.....	134
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Tujuan 7	137
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15.....	138
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik.....	140

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16.....	142
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan.....	143
Tabel 3.42 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17.....	144
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik.....	146
Tabel 3.44 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020.....	156
Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan tahun terakhir RPJMD.....	158
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Pamekasan dengan Standar Provinsi dan Nasional tahun 2020.....	161
Tabel 3.47 Realisasi Anggaran	163
Tabel 3.48 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pamekasan.....	5
Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1.....	77
Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2.....	80
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	86
Gambar 3.4 Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis 4.....	92
Gambar 3.5 Persentase Penurunan Jumlah PMKS.....	95
Gambar 3.6 Peresentase Angkatan Kerja Yang Bekerja.....	99
Gambar 3.7 Peresentase Jumlah Koprasi Aktif.....	102
Gambar 3.8 Peresentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata....	106
Gambar 3.9 Peresentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN.....	109
Gambar 3.10 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.....	113
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11.....	117
Gambar 3.12 Indeks Desa Membangun Kabupaten Pamekasan tahun 2020.	123
Gambar 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13.....	127
Gambar 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14.....	133
Gambar 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15.....	139
Gambar 3.16 Capaian sasaran strategis 16.....	142
Gambar 3.17 Capaian sasaran strategis 17.....	145
Gambar 3.18 Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020	149
Gambar 3.19 Penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI 6 Tahun berturut-turut.....	150
Gambar 3.20 Penghargaan Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	151
Gambar 3.21 Penghargaan Kabupaten dengan Pelayanan Baik dan Menginspirasi di Masa Pandemi pada Ajang Anugerah “INDONESIA AWARD 2020”	152

Gambar 3. 22 Penghargaan IGA 2020 Kabupaten Sangat Inovatif dari Menteri Dalam Negeri 153

Gambar 3.24 The Best On Communication dalam Ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) Angkatan 5 dan 6 Tahun 2020 dari SINDO MEDIA..... 154

Gambar 3. 25 Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem tersebut mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang berupa laporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas tersebut disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjPI).

Laporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan pemerintah daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKjP Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan LKjIP Kabupaten Pamekasan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan tahun 2020 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pamekasan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2020.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

1.3.1 Letak Geografis Wilayah

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura yang terletak di perlintasan jalur jaringan jalan Sampang-Sumenep. Secara administrasi, Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha, terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa. Kecamatan Batumarmar merupakan kecamatan terluas, dengan luas 9.707 Ha atau sekitar 12,25 % dari seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Pamekasan sebagai Ibukota Kabupaten memiliki luas wilayah terkecil yaitu dengan luas 2.647 Ha atau

sekitar 3,34 % dari seluruh wilayah. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah dari 2 %. Secara geografis Kabupaten Pamekasan terletak pada 6°51'-7°31' lintang selatan dan 113°19'-113°58' bujur timur. Dengan luas wilayah sebesar 792,3 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Sampang



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pamekasan
 Sumber: LKPJ Kabupaten Pamekasan, 2020

Tabel 1.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Luas	%
1	Tlanakan	4.810 Ha	6.07

No.	Kecamatan	Luas		%
2	Pademawu	7.189	Ha	9.07
3	Galis	3.186	Ha	4.02
4	Larangan	4,086	Ha	5.16
5	Pamekasan	2.647	Ha	3.34
6	Proppo	7.149	Ha	9.02
7	Palengaan	8.848	Ha	11.17
8	Pengantenan	8.604	Ha	10.86
9	Kadur	3.071	Ha	3.88
10	Pakong	5.242	Ha	6.62
11	Waru	7.003	Ha	8.84
12	Batumarmar	9.707	Ha	12.25
13	Pasean	7.688	Ha	9.7
Jumlah		97,23	Ha	100.00

Sumber: RPJIP Kabupaten Pamekasan, 2017-2021

Tabel 1. 2 Jumlah Desa pada Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

No.	Kecamatan	Wilayah		Luas Lahan (Ha)
		Perkotaan	Perdesaan	
1	Tlanakan	6	11	4,81
2	Pademawu	4	18	7,189
3	Galis	8	1	3,185
4	Larangan	6	8	4,086
5	Pamekasan	17	-	2,647
6	Proppo	5	21	7,149
7	Palengaan	3	9	8,848
8	Pengantenan	4	9	8,604
9	Kadur	2	8	5,242
10	Pakong	3	7	3,071
11	Waru	4	8	7,003
12	Batumarmar	3	10	9,707
13	Pasean	3	6	7,688
Jumlah		68	116	97,23

Sumber: RPJIP Kabupaten Pamekasan, 2017-2021

1.3.1.1 Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Pamekasan tersebar pada berbagai kelas lereng Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Distribusi Kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel 1.3.

Kabupaten Pamekasan merupakan dataran yang relatif datar dengan ketinggian antara 0-350 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah tertinggi terletak di Kecamatan Pengantenan yang berada di ketinggian 312 m dpl. Sedangkan wilayah terendah terletak di Kecamatan Galis yang berada di ketinggian 6 m dpl. Luas daerah menurut kondisi topografi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan				Luas Lahan (Ha)
			0°-15°	15°-25°	25°-40°	>40°	
1	Tlanakan	22	4.810	-	-	-	4,81
2	Pademawu	7	7,189	-	-	-	7,189
3	Galis	6	3,185	-	-	-	3,185
4	Larangan	36	3.843	245	-	-	4,086
5	Pamekasan	15	2.647	-	-	-	2,647
6	Proppo	47	6.882	267	-	-	7,149
7	Palengaan	77	6.830	1.880	138	-	8,848
8	Pengantenan	312	5.733	1.837	513	485	8,604
9	Kadur	140	3.376	272	638	956	5,242
10	Pakong	250	1.993	532	118	433	3,071
11	Waru	159	4.774	1.509	-	720	7,003

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan				Luas Lahan (Ha)
			0°-15°	15°- 25°	25°- 40°	>40°	
12	Batumarmar	16	3.308	5.808	463	128	9,707
13	Pasean	30	5.395	1.905	388	-	7,688
Jumlah			59.964	14.291	2.253	2.722	97,23

Sumber: LKPJ Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 di atas secara kuantitatif dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan terdapat di Kecamatan Pengantenan yakni 312 mdpl dan terendah terlihat di Kecamatan Galis yakni 6 mdpl. luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 0-15% mendominasi kondisi lahan di Pamekasan, yaitu 59,964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola dengan baik karena menempatkan wilayah Pamekasan sebagai daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor.

1.3.1.2 Geologi

Struktur geologi Kabupaten Pamekasan, mempunyai sumber daya alam berupa bahan tambang terdiri dari Holosen Alluvium, Pliosen Limestone Facies, Miosen Sedimentary Facies, Cleiston Clay Sedimentary. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Pamekasan yaitu Aluvial, Glei, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterit Grumosol, dan Podsolik. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Pamekasan antara lain minyak bumi, pasir kuarsa, batu gamping, lempung sedimen, oker (limonit), gipsum dan fosfat. Luas kecamatan berdasarkan jenis kualitas dan tekstur tanah halus, sedang dan kasar di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan 1.5 dibawah ini:

Tabel 1. 4 Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kualitas Tanah di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Aluvial (ha)	Regosol (ha)	Mediteran (ha)	Litosol (ha)
1	Tlanakan	401	-	-	-
2	Pademawu	3.735	-	-	675
3	Galis	-	-	-	525
4	Larangan	-	1.171	1.359	1.376
5	Pamekasan	2.572	-	75	-
6	Propo	-	-	4.665	934
7	Palengaan	-	4.022	647	4.178
8	Pengantenan	-	3.114	1.692	3.678
9	Kadur	-	3.477	-	1.765
10	Pakong	-	-	1.654	450
11	Waru	-	3.770	1.468	1.765
12	Batumarmar	-	6.157	1.536	2.014
13	Pasean	-	1.686	4.279	1.723
Jumlah		6.708	36.063	17.375	19.084

Sumber: LKPJ Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa jenis tanah Aluvia terdapat di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Pamekasan dengan luas tanah Aluvia sebesar 6.708 ha. lalu tanah dengan jenis Regosol terdapat di sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yakni kecamatan Larangan, Palengan, Pengantenan, Kadur, Waru, Batumarmar dan Pasean dengan luas tanah Regosol sebesar 36.063 ha. Sedangkan jenis tanah Mediteran di Kabupaten Pamekasan juga terdapat di sebagian besar kecamatan kecuali kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galik dan Kadur dengan luas tanah jenis Mediteran sebesar 17.375 ha. Dan jenis tanah Litosol di Kabupaten Pamekasan juga terdapat pada sebagian besar kecamatan kecuali di Kecamatan Tlanakan dan Pamekasan, luas tanah Litosol di Kabupaten Pamekasan sebesar 19.084 ha.

Tabel 1. 5 Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Tekstur Tanah di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Halus (ha)	Sedang (ha)	Kasar (ha)
1	Tlanakan	4.364	276	170
2	Pademawu	2.255	4.381	553
3	Galis	-	2.983	203
4	Larangan	-	4.086	-
5	Pamekasan	-	2.647	-
6	Propopo	-	7.149	-
7	Palengaan	-	8.848	-
8	Pengantenan	-	8.604	-
9	Kadur	-	5.242	-
10	Pakong	-	3.071	-
11	Waru	-	7.003	-
12	Batumarmar	-	9.707	-
13	Pasean	-	7.688	-
Jumlah		6.619	71.685	926

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, dapat diketahui bahwa tekstur tanah halus terdapat pada dua kecamatan yakni Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pademawu. Sedangkan tekstur tanah sedang terdapat pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan tekstur tanah sedang tertinggi berada di Kecamatan Batumarmar. Dan untuk tekstur tanah kasar di Kabupaten Pamekasan terdapat di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis.

1.3.1.3 Hidrologi

Kabupaten Pamekasan terdapat 13 sungai yang melintasi beberapa wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan

dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Nama, Panjang dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan

No.	Nama Sungai	Wilayah Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Muara
1	2	3	4	5
1	Kloang	Kadur/Pamekasan	6	Selat Madura
2	Lembun Bunter	Palengaan/Propopo/Pamekasan	11	Selat Madura
3	Sbr. Payung	Propopo/Pamekasan	10	Selat Madura
4	Semajid	Pamekasan/Pademawu	16	Selat Madura
5	Jombang	Pamekasan	4	Selat Madura
6	Tambak Ponteh	Larangan/ Galis	9	Selat Madura
7	Pendi	Larangan/ Galis	9	Selat Madura
8	Egrang	Larangan	8	Selat Madura
9	Berlanjang	Waru	5	Laut Jawa
10	Lesong	Batumarmar	6	Laut Jawa
11	Tamberu	Batumarmar	5	Laut Jawa
12	Angsokah	Pasean	6	Laut Jawa
13	Pasean	Pasean	8	Laut Jawa

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2021

Sementara itu, berikut ini merupakan data sumber mata air dan bendungan. Sumber mata air dan bendungan merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.7 Jumlah Sumber/Mata Air di Kabupaten Pamekasan

NO.	KECAMATAN	SUMBER /MATA AIR	
		JUMLAH	AREAL (HA)
1	2	3	4
1	Tlanakan	1	2
2	Pademawu	1	6
3	Galis	-	-

NO.	KECAMATAN	SUMBER / MATA AIR	
		JUMLAH	AREAL (HA)
1	2	3	4
4	Larangan	3	281
5	Pamekasan	1	5
6	Proppo	-	-
7	Palengaan	2	10
8	Pegantenan	6	260
9	Kadur	1	10
10	Pakong	18	1.257
11	Waru	2	105
12	Batumarmar	1	15
13	Pasean	4	138
Jumlah		40	2.089

Sumber Data: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 13 buah sumber mata air di Kabupaten Pamekasan dengan total volume air sekitar 3510m³ volume air yang tertampung pada musim hujan, dan pada musim kemarau sekitar 947m³.

1.3.1.4 Klimatologi

Seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahun-nya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober- April dan musim kemarau bulan April-Okto-ber. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap hujan yang maksimal.

Tabel 1.8 Jumlah hari hujan tiap bulan di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Rata-rata (hari)
1	Tlanakan	121	1.823	10.1
2	Pademawu	98	1.380	8.2
3	Galis	73	1.530	6.1
4	Larangan	106	1.646	8.8
5	Pamekasan	137	1.096	11.4

No.	Kecamatan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Rata-rata (hari)
6	Proppp	96	1.488	8.0
7	Palengaan	94	1.541	7.8
8	Pengantenan	112	2.573	9.3
9	Kadur	143	3.082	11.9
10	Pakong	70	1.092	5.8
11	Waru	120	2.305	10.0
12	Batumarmar	114	1.920	9.5
13	Pasean	95	1.920	7.9
Jumlah		1.379	23.396	114.9

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2021

1.3.2 Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan). Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Pamekasan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 827.400 jiwa, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 836.220 jiwa, tahun 2015 mengalami peningkatan kembali mencapai 845.314 jiwa, tahun 2016 jumlah penduduk tahun 2016 mencapai 854.190 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 863.000 jiwa, tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 871.490 jiwa, pada tahun 2019 Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan mencapai 880.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan pada tahun terakhir yakni tahun 2020 mencapai 850.057 Jiwa.

Tabel 1. 9 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan dan Rasio Jenis Kelamin penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK
1	Tlanakan	64.731	0,81	97,34
2	Pademawu	83.773	1,01	96,59
3	Galis	28.913	0,53	94,31
4	Larangan	55.985	0,62	92,91
5	Pamekasan	96.761	0,01	94,5
6	Proppo	79.895	1,23	97,35
7	Palengaan	112.897	0,31	97,59
8	Pengantenan	66.835	1,58	96,04
9	Kadur	45.004	0,72	94,78
10	Pakong	36.147	0,67	95,16
11	Waru	66.008	0,82	96,41
12	Batumarmar	95.926	0,24	99,98
13	Pasean	49.616	1,1	95,4
Jumlah		850.057	0,66	96,27

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2021 (diolah)

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Komposisi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sekertaris Daerah merupakan Sekertariat Daerah Tipe A;
- b. Sekertaris DPRD merupakan Sekertariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup;

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koprasi, Urusan Kecil, dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
21. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan Terdiri dari:
1. Kecamatan Tlanakan dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Pademawu dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Galis dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Pamekasan dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Proppo dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Palengaan dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Pegantenan dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Larangan dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pakong dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Watu dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Batumarmar dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Kadur dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Pasean dengan Tipe A;

1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
- b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar yang meliputi:
 - 1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 7) Perhubungan
 - 8) Komunikasi dan Informatika
 - 9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 10) Penanaman Modal

- 11) Kepemudaan dan Olahraga
 - 12) Kebudayaan dan Pariwisata
 - 13) Perpustakaan
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- 1) Perikanan
 - 2) Pertanian
 - 3) Perdagangan

Di samping hal tersebut juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ditempatkan pada perangkat daerah adalah sebesar 6.843 orang dengan tingkat pendidikan terdiri atas tingkat pendidikan SD hingga S3. Tingkat pendidikan OPD se-Kabupaten Pamekasan didominasi oleh ASN yang berpendidikan terakhir, yaitu SLTA sederajat. Berikut ini merupakan rincian data ASN menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pamekasan.:

Tabel 1. 10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	SD	S L T P	S L T A	SETARA SLTA	DIPLO MA	D- III	D- IV	S- 1	S- 2	S- 3	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Bagian Umum Setda	-	-	15	-	-	-	1	7	2	-	25
4	Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setda	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	6
5	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda	-	-	4	-	-	1	-	4	2	-	11
6	Bagian Hukum Setda	-	-	1	-	-	1	-	7	-	-	9
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	-	-	7	-	-	-	-	4	1	-	12
8	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	7
9	Bagian Organisasi Setda	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	10
10	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda	-	-	4	-	-	1	-	2	2	-	9
11	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda	-	-	3	-	-	-	-	4	2	-	9
12	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda	-	2	13	-	-	-	5	5	1	-	26
13	Inspektorat Daerah	-	-	3	-	-	-	-	18	5	-	26
14	RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO	1	7	94	5	-	200	8	98	27	-	440
15	RSUD Waru	-	-	4	2	-	51	1	20	1	-	79

NO	UNIT KERJA	SD	S L T P	S L T A	SETARA SLTA	DIPLO MA	D- III	D- IV	S- 1	S- 2	S- 3	JUMLAH
16	Satuan Polisi Pamong Praja	1	6	28	-	-	-	-	14	4	-	53
17	Sekretariat DPRD	-	1	17	-	-	-	1	12	3	-	34
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	8	-	-	-	1	26	6	-	42
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	10	-	-	-	-	10	3	-	23
20	Badan Keuangan Daerah	-	1	18	-	-	3	-	27	7	-	56
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	13	-	-	-	-	6	6	-	25
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	3	-	-	-	-	20	11	-	34
23	Dinas Pendidikan	4	26	463	10	387	17	-	3.0 39	17 1	-	4.117
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	7	-	-	1	-	9	8	-	25
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	9	-	-	-	-	9	4	-	23
26	Dinas Kesehatan	-	5	106	21	-	334	44	13 5	28	-	673
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1	1	26	-	-	1	-	15	9	-	53
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1	5	-	-	2	-	11	6	-	25
29	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	7	-	-	-	-	14	8	-	29
30	Dinas Lingkungan Hidup	3	11	71	-	-	1	-	25	4	-	115
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	5	-	-	-	-	7	6	-	18

NO	UNIT KERJA	SD	S L T P	S L T A	SETARA SLTA	DIPLO MA	D- III	D- IV	S- 1	S- 2	S- 3	JUMLAH
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	38	-	-	-	1	23	6	-	70
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	5	-	-	-	1	16	8	-	30
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	-	-	3	-	-	2	-	13	9	-	27
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	3	-	-	1	-	10	7	-	22
36	Dinas Perhubungan	-	-	27	-	3	3	-	7	6	-	46
37	Dinas Perikanan	-	-	9	-	-	4	-	19	4	-	36
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2	31	-	-	1	-	22	6	-	64
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	9	-	-	1	1	12	5	-	28
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	11	-	-	4	-	15	3	-	33
41	Dinas Sosial	-	-	16	-	-	1	-	9	5	-	31
42	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	1	11	-	-	3	-	61	8	-	84
43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	13	-	-	-	-	13	5	-	31
44	Kecamatan Batumarmar	-	-	9	-	-	-	-	5	-	-	14
45	Kecamatan Galis	1	-	5	-	-	-	1	9	1	-	17
46	Kecamatan Kadur	-	-	15	-	-	-	-	6	1	-	22
47	Kecamatan Larangan	-	-	14	1	-	-	-	7	-	-	22

NO	UNIT KERJA	SD	S L T P	S L T A	SETARA SLTA	DIPLO MA	D- III	D- IV	S- 1	S- 2	S- 3	JUMLAH
48	Kecamatan Pademawu	-	1	26	-	-	-	-	7	4	-	38
49	Kecamatan Pakong	-	-	9	-	-	-	-	2	2	-	13
50	Kecamatan Palengaan	-	-	8	-	-	-	-	3	2	-	13
51	Kecamatan Pamekasan	-	2	46	1	-	1	-	28	5	-	83
52	Kecamatan Pasean	-	-	6	-	-	-	-	7	-	-	13
53	Kecamatan Pegantenan	1	-	13	-	-	-	1	4	-	-	19
54	Kecamatan Proppo	-	1	16	-	-	-	-	6	2	-	25
55	Kecamatan Tlanakan	-	1	11	-	-	-	-	5	4	-	21
56	Kecamatan Waru	-	-	9	-	-	-	-	7	1	-	17
57	Komisi Pemilihan Umum	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
58	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan												6.843

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2020

1.4.3 Sumberdaya Keuangan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa satu tahun anggaran. Hal ini tercermin dari semakin dinamisnya pendapatan dan belanja daerah. dimana rata-rata pendapatan Kabupaten Pamekasan pada lima tahun terakhir mencapai sebesar Rp. 2.066.902 juta. Sedangkan anggaran belanja Kabupaten Pamekasan rata-rata dalam lima tahun terakhir mencapai Rp. 1.933.973 Juta. Sedangkan Anggaran pembiayaan Kabupaten Pamekasan ditahun 2020 sebesar Rp. 548.824.775 Juta. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.11 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

PENDAPATAN DAERAH		TAHUN (Juta Rupiah)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		178.479	243.312	222.288	177.941	232.249	210.854
1.1	Pajak Daerah	26.950	35.054	36.520	33.584	37.192	33.860
1.2	Retribusi Daerah	13.415	15.448	16.151	16.471	16.513	15.600
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	1.834	1.869	1.923	1.847	2.052	1.905
1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	136.280	190.940	167.694	126.038	176.491	159.489
DANA PERIMBANGAN		1.300.980	1.337.422	1.252.407	1.347.778	1.178.649	1.283.447
2.1	Dana Bagi Hasil (Pajak/Bukan Pajak)	91.983	87.441	135.741	154.379	120.529	118.015
2.2	Dana Alokasi Umum	862.936	847.777	849.764	884.236	120.529	713.048
2.3	Dana Alokasi Khusus	346.061	402.205	266.901	309.162	257.376	316.341

PENDAPATAN DAERAH		TAHUN (Juta Rupiah)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		348.388	325.470	366.284	379.271	356.458	355.174
3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	82.085	104.632	102.728	90.323	100.885	96.131
3.2	Dana Penyesuaian dan	162.546	161.483	187.764	213.056	243.080	193.586
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	92.456	53.986	21.708	12.472	12.491	38.623
3.4	Pendapatan Hibah	11.301	5.369	54.083	63.419	-	33.543
TOTAL PENDAPATAN		1.827.847	1.906.203	1.840.978	1.904.990	2.854.494	2.066.902

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan, 2020 (diolah)

Sementara itu, belanja daerah merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah yang memiliki sifat nilai kekayaan bersih daerah. Belanja Daerah juga merupakan komitmen dan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administratif dan seluruh aspek pembangunan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat melalui alokasi dana dalam APBD yang berkualitas.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 1.12 di bawah ini. Belanja daerah memiliki meningkat yang fluktuaktif karena adanya penyesuaian dengan tingkat inflasi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Belanja Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.864.638 juta, dibandingkan tahun sebelumnya perkembangan belanja Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.972.659 juta dan Rp. 1.719.270 juta. Lalu mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar Rp. 2.393.792 juta. Namun diketahui kembali perkembangan belanja Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebesar

Rp. 1.972.659 juta. Selama lima tahun terakhir rata-rata perkembangan belanja Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 1.933.973 juta.

Tabel 1.12 Perkembangan Belanja Kabupaten Pamekasan Periode Tahun 2016-2020

NO.	KOMPONEN BELANJA	TAHUN (juta rupiah)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Belanja Tidak Langsung	1.009.617	986.922	1.004.697	1.236.372	1.048.538	1.057.229
1.1.	Belanja Pegawai	749.895	670.998	658.341	803.252	652.253	706.948
1.2.	Belanja Hibah	31.486	48.454	74.801	53.985	49.260	51.597
1.3.	Belanja Bantuan Sosial	7.553	7.644	5.894	18.981	14.972	11.009
1.4.	Belanja Bagi Hasil (Provisisi, Pemda lainnya, Desa)	2.350	5.488	6.514	6.346	4.940	5.128
1.5.	Belanja Bantuan Keuangan (Provisisi, Pemda lainnya, Desa)	218.062	251.566	255.780	348.707	308.917	276.606
1.6.	Belanja Tak Terduga	272	2.773	3.367	5.100	18.194	5.941
	Belanja Langsung	855.021	732.582	714.573	1.157.420	924.121	876.743
2.1.	Belanja Pegawai	29.842	34.934	38.277	15.752	8.762	25.513
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.013	325.617	358.929	585.686	473.962	405.041
2.3.	Belanja Modal	544.166	372.031	317.368	555.981	441.396	446.188

NO.	KOMPONEN BELANJA	TAHUN (juta rupiah)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
	TOTAL BELANJA	1.864.638	1.719.504	1.719.270	2.393.792	1.972.659	1.933.973

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan, 2020 (diolah)

Sementara itu, Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Laporan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan terdiri atas pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Laporan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan Kabupaten Pamekasan dapat tersaji melalui tabel 1.13 dibawah ini:

Tabel 1. 13 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

KOMPONEN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
PEMBIAYAAN DAERAH	612.407.212.614,00	548.824.775.466,50
Penerimaan Pembiayaan Daerah	629.907.632.159,00	564.824.775.466,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	479.907.632.159,00	479.907.632.159,50
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	479.907.632.159,00	479.907.632.159,50
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	479.907.632.159,00	479.907.632.159,50
Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	84.917.143.307,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	150.000.000.000,00	84.917.143.307,00
Penerusan pinjaman	150.000.000.000,00	84.917.143.307,00

KOMPONEN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.500.419.545,00	16.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan nomor	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00
Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	0
PDAM	1.500.000.000,00	0
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Dana Revolving UMKM (Dinas Koperasi)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	419.545,00	0
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	419.545,00	0
Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	419.545,00	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamkesan, 2020 (diolah)

1.5 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Beberapa isu strategis yang termuat

dalam RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14 Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Kabupaten Pamekasan tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1	Pembangunan Manusia dan Penanganan Masalah Kemiskinan	Mutu dan Akses Pendidikan;
		Kompetensi Tenaga Pendidik;
		Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan
		Kesadaran dan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
		Intervensi <i>Stunting</i>
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
		Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
		Kualitas Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh.
2	Peningkatan dan Pemerataan Akses Informasi dan Infrastruktur Publik serta Mitigasi Bencana	Kualitas Akses Jalan dan Jembatan;
		Tingkat keamanan sarana dan prasarana transportasi darat;
		Pemanfaatan Teknologi Informatika di Kawasan Perdesaan;
		Managemen Penanganan Bencana
3	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan Berwirausaha	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kawasan Perdesaan
		Pengelolaan Potensi Ekonomi Kreatif Masyarakat;
		Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Mikro dan Usaha Kecil;
		Penguatan Industri rumah tangga berbasis <i>One Village One Product</i>
4	Penguatan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Pertanian serta pelestarian lingkungan hidup	Kualitas akses Jalan Usaha Tani dan Ketersediaan Daerah Irigasi;
		Peran serta dan keberdayaan masyarakat terhadap pelestarian dan kebersihan lingkungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Isu Strategis
		Stabilitas harga pangan untuk meningkatkan tingkat dan kualitas konsumsi gizi masyarakat
5	Stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat	Kesadaran Hukum Masyarakat; Penyalahgunaan Napza/ Narkoba; Partisipasi masyarakat terhadap kondusivitas dan keamanan lingkungan.

Sumber: RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 (diolah)

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.7 Sistematika Penyusunan LKJIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2020 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah setiap tahun terhadap rencana kinerja (*Performance Plan*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Pamekasan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dasar Hukum Penyusunan LKJIP dan dan Sistematika Penyajian LKJIP.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2018-2023, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target sasaran prioritas pembangunan tahun 2020.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja,

pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten Pamekasaan serta penjabaran akuntabilitas keungan.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasaan Tahun 2020, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah (Bupati). Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan, program, serta kebijakan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis lebih berfokus terhadap isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang efektif, fokus, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas. Dengan lima prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Pembangunan Manusia dan Penanganan Masalah Kemiskinan; Peningkatan dan Pemerataan Akses Informasi dan Infrastruktur Publik serta Mitigasi Bencana; Pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan Berwirausaha; Penguatan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Pertanian serta pelestarian lingkungan hidup; Stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Pamekasan yang dapat dilihat dari peluang, tantangan, serta isu strategis yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan membuat visi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

***“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”***

Agar rumusan visi tersebut dapat diimplementasikan secara operasional, maka diperlukan penjabaran pada pokok-pokok visi berdasarkan penjelasannya. Adapun pokok-pokok visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”</i>	Pamekasan Sejahtera dari Bawah	Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi, sosial, politik, dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dapat dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta berbagai indikator lainnya yang meliputi kualitas pendidikan dan kesehatan.
	Pembangunan yang Merata	Pembangunan yang ingin dicapai dalam visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan saja, namun juga akan ditetapkan pada aspek pemerataan. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembangunan tidak

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilakukan di atas prinsip-prinsip keberlanjutan. Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
	Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	Nilai yang menjadi dasar adalah semangat juang dan pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dalam nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus. Karakteristik Kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal yang besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

- 1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.** Pada misi ini akan berfokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- 2. Perekonomian Inklusif yang Bertumbuh pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, dan Sektor Potensial Lainnya di Kota dan Desa.** Pada misi ini akan berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar-kelompok

pendapatan serta pengentasan kemiskinan, pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha mikro sehingga dapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.** Pada misi ini akan berfokus pada Pemerintah yang bersih dan sehat yang akan melahirkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai *good governance*.
- 4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan.** Pada misi ini akan berfokus pada pemenuhan infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat.
- 5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera.** Nilai yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Berpijak dari nilai tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran, serta memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 7 (tujuh) tujuan serta 17 (tujuh belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan, dengan indikator:
 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 68,15.

Sasaran:

1. Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata; dan
2. Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Sektor Pertanian, didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan, dengan indikator:

1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi dengan target 6,00;
2. Persentase Penduduk Miskin dengan target 10,97; dan
3. Indeks Gini dengan target 0,25.

Sasaran:

1. Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah;
 2. Stabilitas, Ketersediaan, dan Mutu Pangan Daerah; dan
 3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro, dengan indikator:

1. Persentase Tingkat Pembangunan Terbuka (PTP) dengan target 2,00; dan
2. Persentase Laju Pertumbuhan Perkapita dengan target 18,00.

Sasaran:

1. Penyerapan Tenaga Kerja;
 2. Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha;
 3. Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat; dan
 4. Iklim Investasi yang Inklusif.
- d. Meningkatkan Kemandirian Fiskal dengan indikator:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (PAD/Total Pendapatan) dengan target 20,00.

Sasaran:

1. Sumber-Sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah.
- e. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel, dengan indikator:

1. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 81.

Sasaran:

1. Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas; dan
 2. Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik.
- f. Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak Bagi Masyarakat, dengan indikator:
1. Indeks Pembangunan Infrastruktur dengan target 85,00.

Sasaran:

1. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar; dan
 2. Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu, dan Tangguh Bencana.
- g. Meningkatkan Harmonisasi Sosial Melalui Optimalisasi Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam Pembangunan, dengan indikator:
1. Indeks Kesalehan Sosial dengan target 76,15.

Sasaran:

1. Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik;
2. Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan; dan
3. Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pamekasan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi Akhir 2023	PD Pendukung Capaian Indikator		
				Deskripsi	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan dan Kesehatan.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Pendidikan	Poin	0,59 (2017)	0,6	0,62	0,65	0,7	0,72	0,72	Dinas Pendidikan	
					Indeks Minat Baca Daerah	Poin	0,65 (2018)	0,67	0,7	0,73	0,75	0,78	0,78	Dinas Perpustakaan dan Kearsian	
				Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Kesehatan	Poin	0,72 (2017)	0,74	0,76	0,78	0,79	0,8	0,8	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, DP3AKB	
2	Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Prosentase Pertumbuhan ekonomi.	Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	Distribusi Presentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	%	33,36 (2017)	33,81	34,17	34,54	34,89	35,26	35,26	Dinas TPHP, Dinas perikanan, Dinas KP dan Peternakan	
					Distribusi Presentase PDRB Kategori Perindustrian	%	6,3** (2017)	6,49	6,58	6,67	6,76	6,86	6,86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Distribusi Presentase PDRB Kategori Perdagangan	%	20,76** (2017)	21,38	21,68	21,99	22,3	22,61	22,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Gini Ratio	Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	poin	80 (2017)	81,03	82	83,21	83,75	83,75	83,75	83,75	Dinas KP dan Peternakan
					Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	81 (2017)	82,03	83	84,21	84,75	84,75	84,75	84,75	Dinas KP dan Peternakan
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Prosentase Penurunan Jumlah PMKS	%	0 (2018)	1,5	1,75	2	2,25	3	3	3	3	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi Akhir 2023	PD Pendukung Capaian Indikator		
				Deskripsi	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Sosial												
	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Penyerapan Tenaga Kerja	Prosentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	95,92	96,35	96,5	96,65	96,8	96,95	96,95	Disnakertrans		
			Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha	Prosentase Jumlah Koperasi Aktif	%	77,8 (2017)	80	80	82	82	85	85	85	Diskop UM	
				Prosentase jumlah Usaha Mikro Aktif	%	10 (2017)	15	20	25	30	35	35	35	Diskop UM	
				Prosentase Pertumbuhan Industri	%	0,77 (2018)	0,86	0,96	1,05	1,15	1,24	1,24	1,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pengembangan Potensi Wisata berbasis partisipasi masyarakat	Prosentase Pertumbuhan Pelaku Usaha ekonomi pariwisata	%	n.a	20	25	28	30	33	33	33	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
				Iklm Investasi yang Kondusif	Prosentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	30	35	40	45	50	55	55	55	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	Rupiah	290.768.976.40	294.258.204.12	297.789.302.57	301.362.774.20	304.979.127.49	308.638.877.02	308.638.877.02	308.638.877.02	308.638.877.02	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Sumber-sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	%	10,2	10,5	11	13,5	15	20	20	Badan Keuangan Daerah		
				Prosentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,009	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam	Predikat SAKIP	Skala	68,44 (B) (2018)	80,05 (A)	80,12 (A)	81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	82,1 (A)	Setda, Bappeda, Inspektorat	
					Atatus Kinerja LPPD	Skala	2,9447 (T)	3,0000 (ST)	3,0400 (ST)	3,0800 (ST)	3,1000 (ST)	3,1100 (ST)	3,1100 (ST)	3,1100 (ST)	Setda, Perpustakaan dan Kearsipan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi Akhir 2023	PD Pendukung Capaian Indikator	
				Deskripsi	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pelayanan Publik	Kualitas dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD, Inspektorat	
				Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n.a	80	81	81	82,5	82,5	82,5	BKPSDM	
				Indeks Transparansi	Poin	n.a	6,1	63	64,5	65	66,5	66,5	Dinas Kopinfo	
				Nilai SPBE	Poin	Na	2,6	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8	Dinas Kominfo	
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	n.a	3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A(-))	4,26 (A(-))	4,51 (A)	4,51 (A)	DispendukCapil, DPM PTSP, Sekretariat DPRD, Kecamatan	
			Tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Desa Membangunan	Angka	0,585 (2018)	0,641	0,698	0,754	0,81	0,866	4,51 (A)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang layak bagi masyarakat	Indeks pembangunan Infrastruktur	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar	Presentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	%	82,8 (2018)	83,3	83,8	84,3	84,8	85,3	85,3	Dinas PUPR
					Presentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	%	70,4 (2018)	71,4	72,4	73,4	74,4	75,4	75,4	Dinas PUPR
					Presentase Prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dengan kondisi baik	%	70,65 (2018)	72,38	72,12	72,85	73,58	74,32	74,32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Presentase pemenuhan infrastruktur persampahan sesuai jakstrada	%	10,91 (2018)	10,91	11,67	12,6	13,36	14,13	14,13	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi Akhir 2023	PD Pendukung Capaian Indikator	
				Deskripsi	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				presentase pemenuhan fasilitas pelengkapan jalan kondisi baik	%	45,35 (2018)	46,25	47,35	48,35	49,35	50	50	Dinas Perhubungan	
			Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	60,26 (2018)	60,25 - 60,96	60,96 - 61,66	61,66 - 62,36	62,36 - 63,06	63,06 - 63,76	60,06 - 63,76	Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks Resiko Bencana	Poin	N.A	125	115	105	100	100	100	BPBD	
				Presentase Kesesuaian pembangunan Wilayah sesuai RTRW	%	70	75	80	83	85	90	90	Bappeda	
5	Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera	Meningkatkan Harmoni Nilai-nilai sosial budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan perempuan dalam pembangunan	Indeks Kesalahan Sosial	Stabilitas Kondisi Sosial, aman, tertib, dan partisipasi politik masyarakat yang baik	Presentase partai politik dan LSM Aktif	%	73	74	74,88	75,89	76,01	77,11	77,11	Bakesbangpol
					Presentase konflik sosial yang tertangani	%	85	86	88	90	94	98	98	Bakesbangpol
					presentase penanganan gangguan trantibum	%	75	77	80	83	86	90	90	satpol PP

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target RPJMD					Kondisi Akhir 2023	PD Pendukung Capaian Indikator
				Deskripsi	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai Keagamaan, budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting pembangunan	Presentase Kebudayaan daerah yang dikembangkan/dilestarikan	%	20	25	30	35	40	45	45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Keberdayaan pemuda dalam pembanguan	indeks pembangunan Gender	Poin	85,68 (2017)	87,12	87,84	88,56	89,28	90	90	DP3AKB
				Indeks Pemberdayaan Gender	poin	55,81 (2017)	57,17	57,86	58,54	59,22	55,9	59,9	DP3AKB
				Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang	145 (Orang)	155	165	175	185	195	195	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023.

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

2.1.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pamekasan

Guna mencapai visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, digunakan sebuah strategi umum RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan pokok, yaitu pembangunan dari bawah, pembangunan merata, dan pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan dari bawah menekankan pada keberpihakan pada rakyat miskin dengan pembangunan yang inklusif. Strategi pembangunan yang merata memiliki fokus pembangunan lebih menekankan pada memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; transformasi birokrasi melalui tata kelola Pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang merata. Strategi pembangunan berkelanjutan memiliki fokus pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing yang sejalan dengan konsep berpusat pada manusia serta membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana. Ketiga rumusan strategi yang telah dijabarkan di atas lebih operasional, maka dapat dijabarkan lebih lanjut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

No.	Strategi Pembangunan Dari Bawah	Strategi Pembangunan Merata	Strategi Pembangunan Berkelanjutan
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan;	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar;	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak;	Pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih;	Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Pengarusutamaan Gender;
3	Peningkatan Produksi Perikanan;	Pengembangan dan revitalisasi wilayah kawasan perdesaan;	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

No.	Strategi Pembangunan Dari Bawah	Strategi Pembangunan Merata	Strategi Pembangunan Berkelanjutan
4	Penguatan Ketersediaan Pangan untuk Kebutuhan Dasar;	Penguatan konektivitas (keterkaitan) antar wilayah;	Peningkatan Mitigasi Bencana
5	Peningkatan Kehidupan Berolahraga;	Penyediaan prasarana dan sasaran transportasi, informasi dan komunikasi,	Penguatan Pengendalian Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang Wilayah.
6	Peningkatan Kesejahteraan PMKS;	Optimalisasi Peluang/Iklm Investasi Penanaman Modal;	
7	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat Tidak Mampu;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;	
8	Peningkatan kualitas angkatan kerja;	Peningkatan Kapasitas Aparatur ASN;	
9	Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;	
10	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;	
11	Optimalisasi Potensi dan Kapasitas Pelaku Industri Pariwisata	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	
12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;	
13	Penguatan Stabilitas Kehidupan Berpolitik dan Kesatuan Bangsa;	Penguatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	
14	Peningkatan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;		
15	Optimalisasi Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kebudayaan Daerah		
16	Peningkatan Prestasi Pemuda Berbasis Kewirausahaan.		

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

Sedangkan Rumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran disajikan secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
1	Tujuan 1: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan	Sasaran 1.1: Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Strategi 1.1.1 : Peningkatan akses dan kualitas pendidikan karakter usia dini, dasar dan menengah;
			Strategi 1.1.2: Penguatan kapasitas tenaga pendidikan;
			Strategi 1.1.3: Peningkatan budaya minat baca;
		Sasaran 1.2: Kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	Strategi 1.2.1: Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
			Strategi 1.2.2: Intervensi pencegahan stunting;
			Strategi 1.2.3: Penguatan kapasitas tenaga kesehatan;
			Strategi 1.2.4: Peningkatan kualitas gizi dan perlakuan hidup sehat;
			Strategi 1.2.5: Peningkatan kehidupan berolahraga;
			Strategi 1.2.6: Peningkatan kualitas ketahanan keluarga.
			Misi 2 : Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi	sasaran 1.1: Kontruksi sektor utama perekonomian daerah	Strategi 1.1.1: Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	
		Strategi 1.1.2: peningkatan populasi dan produkifitas ternak;	
		Strategi 1.1.3: Peningkatan produksi perikanan;	

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	masyarakat		Strategi 1.1.4: Peningkatan kualitas kawasan agropolitan dan minapolitan.
		Sasaran 1.2: Stabilitas, Ketersediaan dan mutu pangan daerah	Strategi 1.2.1: Penguatan ketersediaan pangan untuk kebutuhan dasar.
		Sasaran 1.3: Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Strategi 1.3.1: Peningkatan kesejahteraan PMKS; Strategi 1.3.2: Optimalisasi kualitas pelayanan sosial berbasis masyarakat tidak mampu.
	Tujuan 2 : Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan industri kreatif, koperasi dan usaha mikro	Sasaran 2.1: Penyerapan tenaga kerja	Strategi 2.1.1: Peningkatan kualitas angkatan kerja;
		Sasaran 2.2: Perkembangan industri kreatif, koperasi dan usaha mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha	Strategi 2.2.1: Peningkatan produktivitas Industri Kecil Menengah Strategi 2.2.2: Peningkatan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
		Sasaran 2.3: Pengembangan potensi wisata berbasis partisipasi masyarakat.	Strategi 2.3.1: Optimalisasi potensi dan kapasitas pelaku industri pariwisata.
		Sasaran 2.4: Iklim inovasi yang produktif	Sasaran 2.4.1: Optimalisasi peluang/iklim investasi penanaman modal. 2.4.2: Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal.
		Sasaran 3.1: Sumber-sumber fundamental	Strategi 3.1.1: Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah;

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		penerimaan daerah yang mendukung kapasitas fiskal daerah	Strategi 3.1.2: peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Tujuan 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	Sasaran 1.1: tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Strategi 1.1.1: Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
			Strategi 1.1.2: Peningkatan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
			Strategi 1.1.3: Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
			Strategi 1.1.4: Peningkatan kualitas pelayanan publik;
			Strategi 1.1.5: Penguatan kapasitas sumber daya manusia.
		Sasaran 1.2: Tata kelola pemerintahan desa yang baik	Strategi 1.2.1: Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka desa membangun.
4	Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan		
	Tujuan 1 : Menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan yang layak bagi masyarakat	Sasaran 1.1: Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Strategi 1.1.1: Peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur.
		Sasaran 1.2: Kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu	Strategi 1.2.1: Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
			Strategi 1.2.2: Peningkatan mitigasi bencana;

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		dan tangguh bencana	Strategi 1.2.3: Penguatan pengendalian kesesuaian pembangunan dengan tata ruang wilayah.
5	Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.		
	Tujuan 1: Meningkatkan harmoni nilai-nilai sosial, budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan dalam pembangunan	Sasaran 1.1: Stabilitas kondisi sosial, aman, tertib dan partisipasi politik masyarakat yang baik	Strategi 1.1.1: Penguatan stabilitas kehidupan berpolitik dan kesatuan bangsa; Strategi 1.1.2: Peningkatan stabilitas keagamaan, ketentraman dan keterlibatan umum.
		Sasaran 1.2: Nilai keagamaan, budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting pembangunan.	Strategi 1.2.1: Optimalisasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah.
		Sasaran 1.3: Kebudayaan Pemuda dan Perempuan dalam pembangunan	Strategi 1.3.1: Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis pengarusutama gender
			Strategi 1.3.2: Peningkatan prestasi pemuda berbasis kewirausahaan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

2.1.4.2 Arah Kebijakan

Strategi Pembangunan dari Bawah, Pembangunan Merata dan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan strategi utama pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yang menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan setiap misi pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan

yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 beserta keterkaitannya dengan rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dipilih sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan				
2019	2020	2021	2022	2023
Pemerataan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas.	Pengembangan wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi berbasis wirausaha yang merata didukung SDM yang berkualitas.	Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Percepatan Pembangunan kewilayahan dan Perekonomian Masyarakat.	Pembangunan lingkungan hidup dan potensi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yaitu “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas”. Sedangkan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yaitu “*Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang berdaya Saing dan Berkualitas*”. Adapun Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Penanganan Masalah Kemiskinan
2. Peningkatan dan Pemerataan Akses Informasi dan Infrastruktur Publik serta Mitigasi Bencana
3. Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan Berwirausaha
4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Pertanian serta Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:


Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan dan Kesehatan.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$	BPS Kab. Pamekasan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.1	Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p> I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah I_{RLS} = Indeks Rata-rata lama Sekolah $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan </p>	BPS Kab. Pamekasan
		Indeks Minat Baca Daerah	<p>Indeks Alibaca</p> $= \sqrt[4]{I \text{ kecepatan} \times I \text{ akses} \times I \text{ alternatif} \times I \text{ budaya}}$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	BPS Kab. Pamekasan
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Prosentase Pertumbuhan ekonomi.	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$	BPS Kab. Pamekasan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Gini Ratio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k Pi(Q_i + Q_{i-1})$	BPS Kab. Pamekasan
		Persentase Penduduk Miskin	$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{z - yi}{z} \right)$	BPS Kab. Pamekasan
2.1	Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	Distribusi Presentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	Jumlah PDRB sektor Pertanian dan Perikanan/Jumlah PDRB x 100%	BPS Kab. Pamekasan
		Distribusi Presentase PDRB Kategori Perindustrian	Jumlah PDRB sektor Perindustrian/Jumlah PDRB x 100%	BPS Kab. Pamekasan
		Distribusi Presentase PDRB Kategori Perdagangan	Jumlah PDRB sektor Perdagangan/Jumlah PDRB x 100%	BPS Kab. Pamekasan
2.2	Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing Kelompok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Jumlah stok pangan utama pada tahun (n)}}{\text{Jumlah penduduk pada tahun (n)}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
3.	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah $\frac{\text{Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS Kab. Pamekasan
3.1	Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja yang ada}} \times 100\%$	BPS Kab. Pamekasan
3.2	Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif pada tahun (n)}}{\text{Jumlah industri sampai tahun (n)}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase jumlah Usaha Mikro Aktif	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro aktif pada tahun (n)}}{\text{Jumlah usaha mikro sampai tahun (n)}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah industri tahun (n)} - \text{jumlah industri tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri sampai tahun (n)}} \times 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.3	Pengembangan Potensi Wisata berbasis partisipasi masyarakat	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha ekonomi pariwisata	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi pariwisata pada tahun (n)}}{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi pariwisata sampai tahun (n)}} \times 100\%$	Permendagri No. 86 Tahun 2017
3.4	Iklim Investasi yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	$\frac{(\text{Jumlah Realisasi PMA dan PMDN tahun n} - \text{Jumlah Realisasi PMA dan PMDN tahun n-1}) / \text{Jumlah Realisasi PMA dan PMDN tahun n-1} \times 100\%}{100\%}$	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	Nilai realisasi investasi tahun (n)	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4.	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{PAD}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
4.1	Sumber-sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	$\frac{PAD}{Total\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase PAD Sektor Pariwisata	$\frac{PAD\ sektor\ pariwisata}{Total\ PAD} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	 <p>Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KEMENPAN RB dan atau PMPRB.</p>	Kementerian PAN dan RB
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Predikat SAKIP	Nilai Sakip Kab. Pamekasan Tahun n	Kementerian PAN dan RB
		Status Kinerja LPPD	Hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kementerian Dalam Negeri
		Opini BPK	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPK RI
		Indeks Profesionalitas ASN	$\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ dikenai\ sanksi}{Jumlah\ total\ ASN} \times 100\%$	Badan Kepegawaian Negara
		Indeks Transparansi	$\frac{\sum biXi}{\sum bi}$ <p>Keterangan : bi = bobot terstandarisasi Xi = variabel, sub dimensi, dimensi</p>	Komisi Informasi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data																		
		Nilai SPBE Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot per indikator}$	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	Kementerian PAN dan RB Kementerian PAN dan RB
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																				
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																				
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																				
3	2,6 – < 3,5	Baik																				
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
5.2	Tatakelola Pemerintahan Desa yang Baik	Indeks Desa Membangun	$\text{Presentase (\%)} = \frac{\text{1 Skor indikator}}{60} \times 100$	idm.kemendesa.go.id																		
6.	Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Infrastruktur	$= (\text{Indeks Kondisi Ruas Jalan} \times 40\%) + (\text{Indeks Ketersediaan Air Irigasi} \times 30\%) + (\text{Indeks Pemenuhan SPM Bina Konstruksi} \times 10\%) + (\text{Indeks Kualitas Layanan Transportasi} \times 10\%) + (\text{Indeks Kesesuaian Tata Ruang} \times 10\%)$	BPS Kab. Pamekasan																		
6.1	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Infrastruktur Jalan dan Jembatan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	$\frac{\text{Jumlah Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik}}{\text{Jumlah Saluran Irigasi}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada/Jumlah Kebutuhan Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada x 100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	Jumlah Fasilitas Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik/Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan x 100%	Dinas Lingkungan Hidup
6.2	Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH=30%IKA+30%IKU+40%IKTL IKA adalah Indek Kwaitas Air IKU adalah Indek Kualitas Udara IKTL adalah Indek Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana	Risk= $\frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	BNPB
		Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Kesalehan Sosial	Kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari sikap seseorang/responden yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat yang diukur dengan solidaritas sosial, kerjasama/mutualitas, toleransi, adil dan menjaga ketertiban umum. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen kuesioner terstruktur dengan teknik pengambilan data yaitu teknik sampling heterogen, stratified random sampling dan wawancara dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9%	Bappeda
7.1	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik	Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	Jumlah Partai Politik dan LSM Aktif/Jumlah Partai Poitik dan LSM X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani.	Jumlah konflik sosial yang ditangani/Jumlah konflik sosial x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani/Jumlah gangguan Trantibum x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
7.2	Nilai Keagamaan, Budaya dan Tradisi Lokal sebagai Bagian Penting Pembangunan	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan / dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah kesenian dan kebudayaan yang atraktif}}{\text{Jumlah keseluruhan kesenian dan kebudayaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.3	Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + \text{inc-ds})]$ Keterangan: X _{ede} (1) = X _{ede} untuk harapan hidup X _{ede} (2) = X _{ede} untuk harapan pendidikan Inc-ds = indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk.	BPS Kab. Pamekasan
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 (I(\text{par}) + I(\text{DM}) + \text{inc-ds})$ Keterangan: I(par) = Indeks keterwakilan di parlemen (I(par)) I(DM) = Indeks pengambilan keputusan (IDM) I inc-ds = Indeks distribusi pendapatan (I inc-ds) $EDEP(\text{par}) = \{(Xf)(Yf) - 1 + (Xm)(Ym) - 1\} - 1$ $I(\text{par}) = (EDEP(\text{par})) / 50$ Keterangan: Xf = proporsi penduduk perempuan Xm = proporsi penduduk laki-laki Yf = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen Ym = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen	BPS Kab. Pamekasan
	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berprestasi pada tahun n	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *outcome* dan *output* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada suatu tahun tertentu. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RKPD fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat

(outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan 2020 Kabupaten Pamekasan

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020
1.	Aspek Kesejahteraan Rakyat			
1.1	Fokus Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi			
1.1.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,22
1.1.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,32	2,65
1.1.3	Gini Rasio	Poin	0,332	0,33
1.1.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60,06	66
1.1.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,74	60,96 - 61,66
1.1.6	Indek Kesalehan Sosial	Poin	N/A	74,56
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	65,94	65,56
1.2.2	Presentase Penduduk Miskin	%	13,95	12,98
2.	Aspek Layanan Umum			
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
2.1.1	Urusan Pendidikan			
	Indeks Pendidikan	%	0,59	0,62
2.1.2	Urusan Kesehatan			

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020
	Indeks Kesehatan	%	0,73	0,76
2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	%	71,95	84,2
	Persentase Saluran Irigasi	%	82,96	16,75
2.1.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Persentase Sarpras umum permukiman dalam kondisi baik	%	59,31	72,18
2.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	50	80
	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	50	88
2.1.6	Urusan Sosial			
	Persentase penurunan jumlah PMKS	%	1,7	1,75
2.1.7	Urusan wajib bukan pelayanan dasar			
	Urusan Tenaga Kerja			
	Persentase angkatan kerja yang bekerja	%	97,68	96,071
2.1.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Indeks Pembangunan Gender	%	86,05	87,84
	Indeks Pemberdayaan Gender	%	57,29	57,86
2.1.9	Urusan Pangan			
	Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Poin	68,49	82
	Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Poin	68,20	83
2.1.10	Urusan Lingkungan Hidup			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,74	60,96 - 61,66
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persempahan dalam jakstada	%	10,91	72
2.1.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Cakupan Desa Maju	Jumlah	12	9
2.1.12	Urusan Perhubungan			

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020
	Presentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	%	99,43	48,26
2.1.13	Urusan Komunikasi dan Informatika			
	Indeks Transparansi	Poin	75,4	63
	Nilai SPPE	Poin	2,2	3,2
2.1.14	Urusan Koperasi Urusan Kecil dan Menengah			
	Presentase Koperasi Aktif	%	56	80
	Presentase Usaha Mikro Aktif	%	4,7	20
2.1.15	Usaha Penanaman Modal			
	Presentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	-3,33	40
	Jumlah Realisasi investasi (Rp)	Rupiah	112.141.625.147	29.778.930.257
2.1.16	Urusan Kepemudaan dan Olah raga			
	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang	135	160
2.1.17	Urusan Kebudayaan			
	Presentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan	%	31	73
2.1.18	Urusan Perpustakaan			
	Indeks Minat Baca Daerah	%	2,38	0,7
2.2	Urusan Pilihan			
2.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan			
2.2.2	Urusan Pertanian			
	Distribusi Presentase PDRB Kategori Pertanian, Kelautan dan perikanan	%	32,71	34,17
2.2.3	Urusan Pariwisata			
	Presentase PDA Sektor Pariwisata	%	0,0092	0,01
2.2.4	Urusan Perdagangan			
	Distribusi Presentase PDRB Kategori perdagangan	%	22,26	21,68
2.2.5	Urusan Perindustrian			
	Distribusi presentase PSRB Kategori Perindustrian	%	6,77	6,58
2.2.6	Urusan Pemerintahan Umum			

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020
	Presentase Partisipasi Polittk Masyarakat dalam pemilu	%	-	74,88
	Predikat SAKIP	Skala	68,80 (B)	80,12 (A)
	Status Kinerja LPPD	Skala	3,00 (ST)	3,0400 (ST)
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	1,39 (D)	3,76 (B)
	Presentase Arsiparis yang ditindaklanjuti	%	-	100
2.3	Urusan Penunjang			
2.3.1	Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan			
	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan daerah RTRW	%	96	80
2.3.2	Urusan Penunjang Pengawasan			
	Presentase Tindak Lanjut temuan			
	APIP	%	N/A	100
	BPK	%	-	84
2.3.3	Urusan Penunjang Kepegawaian & Diklat			
	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	31,57	81
2.3.4	Urusan Penunjang Keuangan			
	Opini BPK	Skala	WTP	-
	Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah	%	9,4	11
3.	Aspek Daya Saing			
3.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	-	72,5
	Presentase Pertumbuhan Nilai PMA DAN pmdn	%	-3,33	40

Sumber: RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Tabel 2.8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

PRIORITAS DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Mnausia dan	Dinas Pendidikan	Pendidikan Sekolah Dasar (Sd)
		Peningkatan Infrastruktur Sd

PRIORITAS DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
Penanganan Masalah Kemiskinan		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Peningkatan Infrastruktur Smp
		Pendidikan Anak Usia Dini
		Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini
		Pendidikan Non Formal
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidik
		Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya.
		Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkungan Kesehatan
	Dinas Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
		Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri.
		Ketahanan Keluarga
		Kesehatan Reproduksi Remaja
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan
		Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Mineral Dan Air Limbah		
Peningkatan dan Pemerataan Akses Informasi dan Infrastruktur Publik serta Mitigasi Bencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Dan Jembatan
		Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
		Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
		Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai Dan Sumber Daya Air Lainnya
		Pengendalian Banjir
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkungan Pekerjaan Umum
		Dinas Komunikasi
	Penyediaan Dan Pengendalian Infrastruktur TIK	

PRIORITAS DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
	dan Informasi	Pengelolaan Data Statistik
	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
		Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
		Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
		Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Penanganan Kedaruratan Dan Logistik
		Rehabilitasi Dan Rekontruksi (Pasca Bencana)
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan Berwirausaha	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Dinas Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan
		Pengembangan Perikanan Tangkap
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisata
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkungan Kepariwisata
		Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan Kesempatan Kerja
		Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkungan Hidup Ketenagakerjaan
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro
		Peningkatan Produksi Dan Restrukturasi Usaha
		Pengembangan Pembiayaan Koperasi Dan Usaha Mikro
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Pengembangan Dan Penegelolaan Pasar
		Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Penguatan Ketahanan Pangan dan	Dinas Tanaman Pangan,	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan
		Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura

PRIORITAS DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
Sumber daya Pertanian serta pelestarian lingkungan hidup	Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
		Peningkatan Kualitas Bahan Baku
	Dinas Lingkungan Hidup	Penataan Dan Peningkatan Kapasitas LH
		Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dan B3
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Peningkatan Tata Lingkungan
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
		Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan
Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Bagian Hukum Setda	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
		Peningkatan Fasilitas Bantuan Hukum
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		Kewaspadaan Nasional
	Satuan Polisi Pamong Praja	Pendidikan Politik Masyarakat
		Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.	

Sumber: RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen Bupati yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Indeks Pendidikan	0,62
		Indeks Minat Baca Daerah	0,7
2.	Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kesehatan	0,76
3.	Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	34,17%
		Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	6,58%
		Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	21,68%
4.	Stabilitas, Ketersediaan, dan Mutu Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	82
		Pola Pangan Harapan Konsumsi	83
5.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	1,75%
6.	Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	96,50%
7.	Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	80%
		Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	20%
		Persentase Pertumbuhan Industri	0,96%
8.	Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	25%
9.	Iklim Investasi yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	40%
		Jumlah Realisasi Investasi (Rp.)	29.778.930.257
10.	Sumber-sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	11%
		Persentase PAD Sektor Pariwisata	0,01%
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan	Predikat SAKIP	80,12 (A)
		Status Kinerja LPPD	3,0400 (ST)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pelayanan Publik yang Berkualitas	Opini BPK	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	81
		Indeks Transparansi	63
		Nilai SPBE	3,2
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76 (B)
12.	Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Indeks Desa Membangun	0,685
13.	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	83,80%
		Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	72,40%
		Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	72,12%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	11,67%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Kondisi Baik	47,35%
14.	Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat Tertata, Terpadu, dan Tangguh Bencana.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,96-61,66
		Indeks Risiko Bencana	115
		Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW	80%
15.	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Masyarakat yang Baik.	Persentase Partai Politik dalam LSM	27,50%
		Persentase Konflik Sosial yang tertangani	88%
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80%
16.	Nilai Keagamaan, Budaya dan Tradisi Lokal sebagai Bagian penting dalam pembangunan.	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan.	30%
17.	Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,84
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,86
		Jumlah Pemuda yang Berprestasi	165

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja dan realisasi kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kerjanya. Capaian atas kinerja instansi pemerintah perlu menjelaskan pula terkait sumber daya yang mendukung keberhasilan ataupun ketidakberhasilan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Pada konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara

indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1 Pengukuran Kinerja 2020

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realisasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode *composite* (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator). Hasil nilai *composite* ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada didalam kelompok tersebut. Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan kelompok indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian rata – rata kinerja} = \frac{\text{Jumlah Persentase (\%) Capaian seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Setiap Sasaran}}$$

Hasil dari perhitungan diatas, maka ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1	85 s/d 100	Delapan puluh lima persen s/d seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55 s/d < 70	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

3.2 Capaian Kinerja 2020

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 adalah sebesar 100,36% atau kategori “Sangat Baik” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja 2020		Capaian Kinerja 2020	Kategori
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,56	66,26	101,07%	Sangat Berhasil
2	Indeks Pendidikan	Poin	0,62	0,60	96,77%	Sangat Berhasil
3	Indeks Minat Baca Daerah	Poin	0,70	0,80	114,29%	Sangat Berhasil
4	Indeks Kesehatan	Poin	0,76	0,73	96,05%	Sangat Berhasil
5	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	-2,54	-48,66%	Kurang Berhasil
6	Gini Rasio	Poin	0,3	0,32	93,33%	Sangat Berhasil
7	Persentase Penduduk	%	12,98	14,60	88,90%	Sangat Berhasil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja 2020		Capaian Kinerja 2020	Kategori
			Target	Realisasi		
	Miskin					
8	Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	34,17	32,50	95,11%	Sangat Berhasil
9	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	%	6,58	6,77	102,89%	Sangat Berhasil
10	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	%	21,68	20,17	93,04%	Sangat Berhasil
11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	82	70,69	86,21%	Sangat Berhasil
12	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	83,00	70,5	84,94%	Berhasil
13	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,75	1,81	103,43%	Sangat Berhasil
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Poin	2,65	3,49	68,30%	Cukup Berhasil
15	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	96,5	69,82	72,35%	Berhasil
16	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	%	80	59,6	74,50%	Berhasil
17	Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	%	20	22,5	112,50%	Sangat Berhasil
18	Persentase Pertumbuhan Industri	%	0,96	13,06	1360,42%	Sangat Berhasil
19	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	%	25	90	360,00%	Sangat Berhasil
20	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	40	77,58	193,95%	Sangat Berhasil
21	Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	Rp.	29.778.930.257	18.631.329.775	63%	Cukup Berhasil
22	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	11	14,45	115,73%	Sangat Berhasil
23	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	%	11	12,73	115,73%	Sangat Berhasil
24	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,01	0,01	100,00%	Sangat Berhasil
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	66	-	-	Data Belum Rilis
26	Nilai SAKIP	Skala	80,12 (A)	-	-	Data Belum Rilis
27	Status Kinerja LPPD	Skala	3,0400 (ST)	-	-	Data Belum Rilis
28	Opini atas Laporan BPK	Skala	WTP	-	-	Data Belum Rilis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja 2020		Capaian Kinerja 2020	Kategori
			Target	Realisasi		
29	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81	73	90,12%	Sangat Berhasil
30	Indeks Transparansi	Poin	63,0	73	115,87%	Sangat Berhasil
31	Nilai SPBE	Poin	3,2	3,01	94,06%	Sangat Berhasil
32	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	3,76 (B)	2,85	75,80%	Berhasil
33	Indeks Desa Membangun	Poin	0,698	-	-	Data Belum Rilis
34	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	72,5	-	-	Data Belum Rilis
35	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	%	83,8	75,95	90,63%	Sangat Berhasil
36	Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	%	72,4	82,96	114,59%	Sangat Berhasil
37	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	%	72,12	-	-	Data Belum Rilis
38	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	%	11,67	33,03	283,03%	Sangat Berhasil
39	Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	%	47,35	47,85	101,06%	Sangat Berhasil
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	60,96-61,66	61,79	100%	Sangat Berhasil
41	Indeks Resiko Bencana	Poin	115	160,45	139,52%	Sangat Berhasil
42	Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW.	%	80	98	123%	Sangat Berhasil
43	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	74,56	81,31	109,05%	Sangat Berhasil
44	Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	%	74,88	90	120,19%	Sangat Berhasil
45	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani.	%	88	100	113,64%	Sangat Berhasil
46	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	80	82,5	103,13%	Sangat Berhasil
47	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/ dilestarikan	%	30	67	223,33%	Sangat Berhasil
48	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	87,84	86,17	98%	Sangat Berhasil
49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	57,86	-	-	Data Belum Rilis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja 2020		Capaian Kinerja 2020	Kategori
			Target	Realisasi		
50	Jumlah Pemuda Berprestasi	orang	165	118	71,52%	Berhasil

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2021

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023, untuk analisis dan capaian kinerja tahun 2020 akan dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 2020

Misi 1:

Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 1:

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,56	66,26	101,07%	Sangat Berhasil

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2021

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programme* (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding

metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Indeks Pembangunan Manusia”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada tujuan kesatu adalah sangat berhasil, dengan persentase capaian sebesar 101,07 %. Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,26 dari target yang ditetapkan yaitu 65,56.

Sasaran 1:

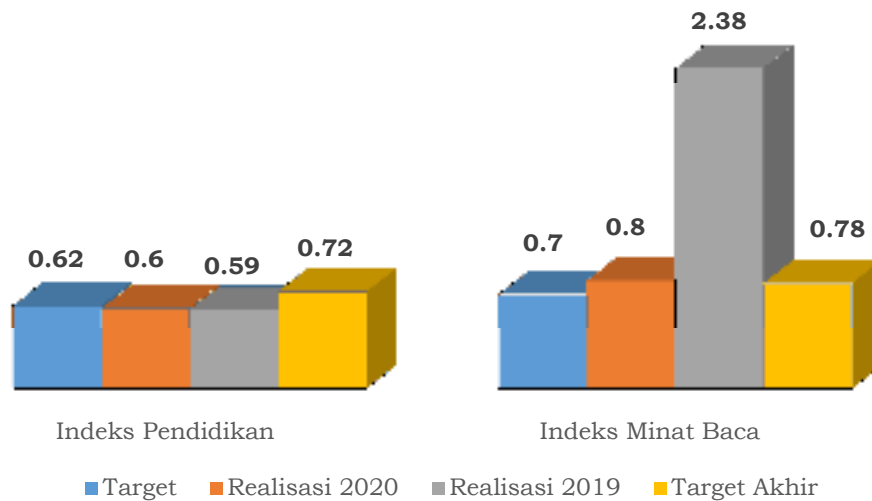
Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	0,62	0,60	96,77%	Sangat Berhasil
Indeks Minat Baca	0,70	0,80	114,29%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran			105,53%	Sangat Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, 2021.

Capaian sasaran strategis 1 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 105,53% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja ini ada 2 macam, yaitu Indeks pendidikan dan indeks minat baca. Realisasi kinerja indeks Pendidikan sebesar 0,60 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,62, sehingga capaian kinerja Indeks Pendidikan adalah sebesar 96,77 atau tercapai dengan sangat berhasil. Sedangkan capaian kinerja indeks minat baca mencapai 114,29% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 0,80 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,70.



Gambar 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Sumber: BPS Kab. Pamekasan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, 2021 (Diolah)

Nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 0,60 dari target sebesar 0,62. Pada tahun 2020, nilai indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 0,59 menjadi 0,60. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 83,33%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Nilai Indeks Minat Baca Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 0,8 dari target sebesar 0,7. Pada tahun 2020, nilai indeks minat baca Kabupaten Pamekasan menurun 1,58 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi di tahun 2020 sudah melampaui target akhir tersebut.

Pencapaian kinerja sasaran “Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata” didukung oleh 11 Program yaitu sebagai berikut

Tabel 3.5 Program Pendukung Capaian Sasaran Strategis 1

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1	Program Pendidikan Dasar (SD)	Dinas Pendidikan	56.084.181.396,00	4.990.207.600,00	8,90%
2	Program Peningkatan Infrastruktur SD		28.038.258.901,00	25.688.996.006,00	91,62%
3	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		14.308.274.600,00	1.575.404.794,00	11,01%
4	Program Peningkatan Infrastruktur SMP		21.272.431.000,00	21.067.502.128,60	99,04%
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini		670.850.000,00	588.003.535,00	87,65%
6	Program Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini		5.281.164.000,00	5.230.149.982,00	99,03%
7	Program Pendidikan Non Formal		308.625.000,00	283.918.375,00	91,99%
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		16.119.632.100,00	15.603.614.500,00	96,80%
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.587.659.600,00	1.546.506.620,00	97,41%
10	Program Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	326.500.000,00	324.137.525,00	99,28 %
11	Program Pembinaan, Pengembangan, Teknologi Informasi dan Promosi		177.000.000,00	168.681.211,00	95,30 %
Hasil Akhir			144.174.576.597,00	77.067.122.276,60	53,45%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pndapatan, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kurang efektifnya layanan pendidikan di masa pandemi Covid - 19
- 2) Adanya angka putus sekolah terutama di sekolah swasta
- 3) Berkurangnya minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Merubah strategi pola pelayanan pendidikan di masa pandemi
- 2) Meningkatkan fasilitas layanan pendidikan di sekolah
- 3) Memberikan fasilitas untuk memudahkan akses melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

Sasaran 2:

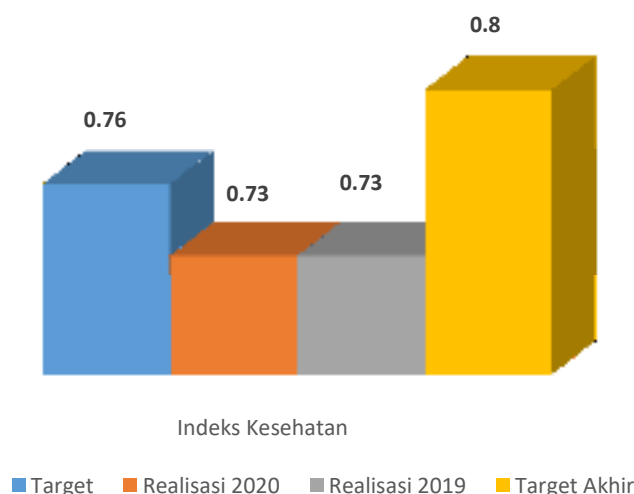
Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	0,76	0,73	96,05%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran			96,05%	Sangat Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021

Capaian sasaran strategis 2 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 96,05% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks kesehatan. Realisasi kinerja indeks kesehatan sebesar 0,73 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,76, sehingga capaian kinerja Indeks Kesehatan adalah sebesar 96,05% atau tercapai dengan sangat berhasil.



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021 (Diolah)

Nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 0,73 dari target sebesar 0,76. Pada tahun 2020, nilai indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 0,73. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 91,25%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata” didukung oleh 19 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Program Pendukung Capaian Sasaran Strategis 2

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	53.809.182.562,00	45.700.769.548,60	84,93%
2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/		2.305.239.383,00	1.021.676.000,00	44,32%

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	puskesmas pembantu dan jaringannya				
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit		1.292.311.000,00	1.126.269.391,00	87,15%
4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		2.775.728.000,00	1.217.193.155,00	43,85%
5	Program Pelayanan Kesehatan		5.723.880.280,00	4.636.258.795,00	81,00%
6	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		5.814.066.000	5.743.765.495	98,79%
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan,		37.520.029.396,00	36.337.865.330,00	96,85%
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		0	0	0%
9	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		1.246.370.000,00	989.325.000,00	79,38%
10	Program Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit	Rumah Sakit (RSUD WARU)	3.229.991.444,00	2.645.205.181,00	81,90%
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan		4.967.837.382,00	4.104.788.864,00	82,63%
12	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Rumah Sakit (RSUD DR. SLAMET MARTODIRJO)	145.364.434.217,00	104.905.171.966,00	72,17%

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	Rumah Sakit				
13	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan		8.728.877.123,00	8.306.704.947,00	95,16%
14	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		716.915.000,00	708.460.469,00	98,82%
15	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat		0	0	0%
16	Program Keluarga Berencana	DP3KAB	3.991.187.000,00	3.229.474.076,00	80,92%
17	Program Ketahanan Keluarga		394.310.000,00	379.725.000,00	96,30%
18	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri		2.217.290.000,00	2.214.600.000,00	99,88%
19	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		0	0	0%
Hasil Akhir			280.097.648.787,00	223.267.253.217,60	79,71%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Belum maksimalnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.

- 2) Sarana prasarana untuk pencapaian target kinerja kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.
- 3) Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waru masih belum optimal.
- 4) Masih belum terpenuhinya SDM Rumah Sakit yang sesuai dengan Standart Kualifikasi Tenaga Kesehatan
- 5) Kurangnya tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih kurangnya fasilitasi bagi perempuan, anak dan remaja.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan melalui berbagai bimbingan teknis dan pendidikan pelayanan umum.
- 2) Pengadaan sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yang memadai dan pemeliharaan sesuai standar.
- 3) Melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang tersedia terbatas, serta melakukan pemeliharaan secara rutin/berkala agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya guna mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan efisien.

Misi 2:

Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya

Tujuan 2

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Sektor Pertanian, didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,22	-2,54	-48,66%	Kurang Berhasil
Indeks Gini	0,3	0,32	93,33%	Sangat Berhasil
Persentase Penduduk Miskin	12,98	14,60	88,90%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			44,52%	Kurang Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Persentase Pertumbuhan Ekonomi”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator kinerja tersebut adalah kurang berhasil, dengan persentase capaian sebesar -48,66 %. Realisasi indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Ekonomi” sebesar -2,54 dari target yang ditetapkan yaitu 5,22.

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Indeks Gini”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator kinerja tersebut adalah kurang berhasil, dengan persentase capaian sebesar 93,33%. Realisasi indikator kinerja “Indeks Gini” sebesar 0,32 dari target yang ditetapkan yaitu 0,3.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Persentase Penduduk Miskin”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator kinerja tersebut adalah sangat berhasil, dengan persentase capaian sebesar 88,90%. Realisasi indikator kinerja “Persentase Penduduk Miskin” sebesar 14,60 dari target yang ditetapkan yaitu 12,98.

Sasaran 3:

Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah

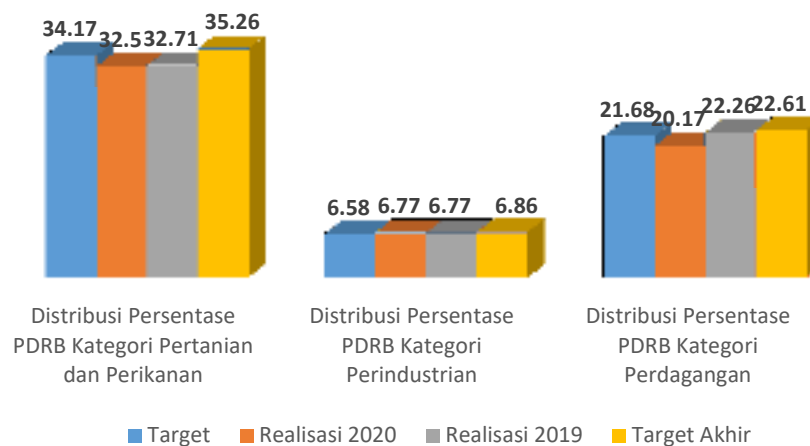
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	34,17	32,50	95,11%	Sangat Berhasil
Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	6,58	6,77	102,89%	Sangat Berhasil
Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	21,68	20,17	93,04%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			97,01%	Sangat Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021

Capaian sasaran strategis 3 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 97,01% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja ini ada 3 macam, yaitu Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan, Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian, dan Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan. Realisasi kinerja Distribusi Persentase PDRB

Kategori Pertanian dan Perikanan sebesar 32,50 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 34,17, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 95,11% atau tercapai dengan sangat berhasil. Selanjutnya, capaian kinerja Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian mencapai 102,89% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 6,77 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 6,58. Sedangkan capaian kinerja Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan juga tercapai dengan kategori sangat baik dengan nilai pencapaian sebesar 93,04%, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 20,17 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 21,68.



Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sumber: Diolah, 2021

Distribusi PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 32,5 dari target sebesar 34,17. Pada tahun 2020, realisasi PDRB Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 32,71 menjadi 32,50. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang

dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 92,17%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Distribusi PDRB Kategori Perindustrian Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 6,77 dari target sebesar 6,58. Pada tahun 2020, realisasi PDRB Perindustrian Kabupaten Pamekasan stagnan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 98,69%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Distribusi PDRB Kategori Perdagangan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 20,17 dari target sebesar 21,68. Pada tahun 2020, realisasi PDRB Perdagangan Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 22,26 menjadi 20,17. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 89,21%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah” didukung oleh 21 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Populasi Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	644.692.000,00	621.930.730,00	96,47%
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		101.308.000,00	100.708.000,00	99,41%
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		900.230.000,00	898.368.800,00	99,79%
4	Program Peningkatan Pelayanan UPTD		0	0	0%
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan		257.200.000,00	243.650.200,00	94,73%

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan	731.363.400,00	682.639.846,00	93,34%
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		1.812.653.000,00	1.336.671.850,00	73,74%
8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		111.825.400,00	98.681.400,00	88,25%
9	Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan		192.413.000,00	189.116.800,00	98,29%
10	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	199.140.000,00	167.417.493,00	84,07%
11	Peningkatan Sarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan		0	0	0%
12	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		445.000.000,00	431.066.240,00	96,87%
13	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		96.000.000,00	93.148.200,00	99,26%
14	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		290.000.000,00	287.841.050,00	96,84%
15	Peningkatan Kualitas Bahan Baku		1.421.400.000,00	1.363.332.125,00	95,91%
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas	1.369.227.600,00	1.078.532.098,00	78,77%
17	Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial		5.671.300.000,00	4.207.405.100,00	74,19%
18	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		582.173.650,00	563.971.905,00	96,87%
19	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		161.700.000,00	103.459.399,00	63,98%
20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		1.425.229.600,00	1.372.844.062,00	96,32%

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar		8.480.720.232,00	7.772.604.909,00	91,65%
Hasil Akhir			24.893.575.882	21.613.390.207	86,82%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Adanya beberapa kegiatan tahun 2020 tidak berdampak langsung untuk peningkatan produksi perikanan sehingga diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran.
- 2) Produksi perikanan tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau perubahan cuaca yang ekstrem, masih terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih adanya serangan hama dan penyakit pada budidaya rumput laut.
- 3) Kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan sebagian besar masih kelas pemula dan sebagian baru terbentuk.
- 4) Belum meratanya kemampuan dan kompetensi petani menerapkan teknologi tepat guna khususnya dalam sistem pertanian modern dan organik.
- 5) Masih belum optimalnya peran dan fungsi kelompok tani dalam mendorong masyarakat meningkatkan hasil-hasil pertaniannya.
- 6) Luas panen biofarmaka rendah disebabkan tanaman biofarmaka pada umumnya ditanam kurang intensif dan sebagai tanaman sela sehingga sangat tergantung dari kondisi iklim. Pada Tahun 2020 kondisi iklim kurang bagus (curah hujan rendah) sehingga menyebabkan luas panen biofarmaka rendah.
- 7) Rendahnya tingkat pertumbuhan produk IKM.

8) Rendahnya pertumbuhan usaha perdagangan di Kabupaten Pamekasan.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Perlu perencanaan tahunan yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) agar tidak ada tumpang tindih atau kesalahan dalam kewenangan/pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Program dan Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota diperlukan sinergitas pengusulan kegiatan ke DKP Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI baik terkait sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- 3) Diperlukan pembinaan terhadap penyuluh perikanan untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok sehingga berpengaruh signifikan terhadap proses pendampingan dalam pencapaian indikator kinerja peningkatan kelas kelompok.
- 4) Pembinaan dan penerapan *good agriculture practice*.
- 5) Sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok tani dalam bercocok tanam modern dan berbasis organik.
- 6) Sosialisasi pengendalian hama dan penyakit ikan.
- 7) Pendampingan kelompok tani dalam budidaya biofarmaka secara intensif melalui pelatihan dan demplot.
- 8) Melakukan pembinaan terhadap pelaku IKM dan produk unggulan daerah;
- 9) Melakukan fasilitasi pemberian legalitas terhadap produk IKM

- 10) Melakukan pembangunan sentra-sentra IKM beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya
- 11) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
- 12) Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi barang
- 13) Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah

Sasaran 4

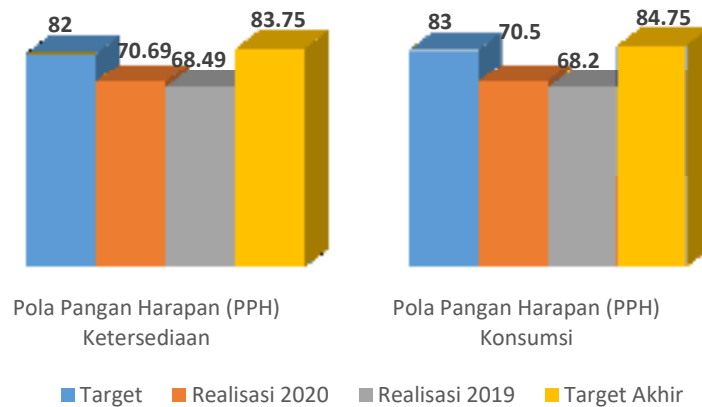
Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	82	70,69	86,21%	Sangat Berhasil
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	83,00	70,5	84,94%	Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			85,58%	Sangat Berhasil

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021.

Capaian sasaran strategis 4 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 85,58% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 2 macam, yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Realisasi kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 70,69 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 86,21% atau tercapai dengan sangat berhasil. Sedangkan, capaian kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 84,94% atau tercapai dengan berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 70,5 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 83.



Gambar 3.4 Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis 4

Sumber: Diolah, 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 70,69 dari target sebesar 82. Pada tahun 2020, realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 68,49 menjadi 70,69. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 84,41%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capain yang berhasil dengan realisasi sebesar 70,5 dari target sebesar 83. Pada tahun 2020, realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 68,2 menjadi 70,5. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 83,19%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	366.185.000,00	366.099.000,00	99,98%
2	Program Pemberdayaan Peternak		0	0	0%
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Peternakan		400.000.000,00	393.425.000,00	98,36%
4	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		40.000.000,00	39.275.000,00	98,19%
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		2.740.000,00	2.740.000,00	100,00%
Hasil Akhir			806.185.000,00	801.539.000,00	99,42%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Pencapaian kinerja sasaran “Stabilitas, Ketersediaan dan Mutu Pangan Daerah” didukung oleh 5 program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan Peternak, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Peternakan, Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Ketidaktercapaian PPH menunjukkan bahwa sumber daya dan faktor pendukung yang disediakan kurang mampu untuk mewujudkan target PPH. Ditambah pula dengan tradisi pola makan masyarakat Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

- 2) Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan.
- 3) Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrem) berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat.
- 4) Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih memerlukan penanganan serius.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Optimalisasi sumber daya dan faktor pendukung untuk mewujudkan target PPH.
- 2) Mengupayakan peningkatan ketersediaan energi dan protein mengingat kebutuhan energi dan protein makin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
- 3) Melakukan penanganan serius terhadap mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya, salah satunya melalui sosialisasi mutu dan keamanan pangan demi kesejahteraan kelompok usaha dan mengembangkan usaha pangan efektif.
- 4) Mengadakan bimbingan teknis kelompok usaha olahan pangan, berupa pengolahan, pengemasan dan mutu dan keamanan olahan pangan. Berkaitan dengan keamanan, para pengusaha olahan pangan dihimbau untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan agar konsumen diberikan jaminan dalam mengkonsumsi pangan selain higienis dan terhindar dari campuran bahan-bahan yang merugikan kesehatan.

Sasaran 5

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

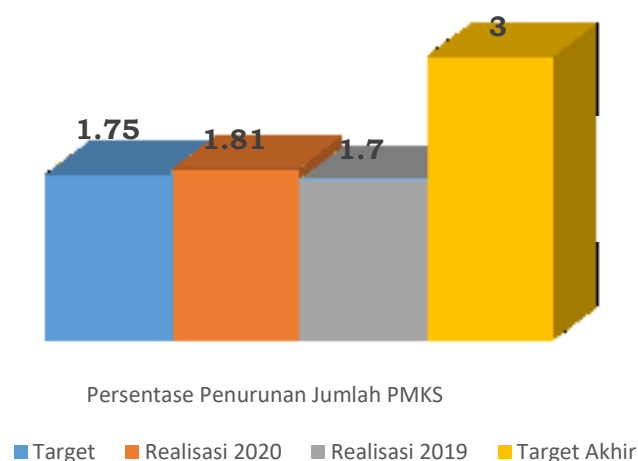
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Penurunan Jumlah PMKS	1,75%	1,81%	103,43%	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-rata capaian kinerja			103,43%	Sangat Berhasil

Sumber data: Dinas Sosial, 2021

Capaian sasaran strategis 5 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 103,43% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Persentase Penurunan Jumlah PMKS. Realisasi kinerja Persentase Penurunan Jumlah PMKS sebesar 1,81% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,75%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,43% atau tercapai dengan sangat berhasil.



Gambar 3. 5 Persentase Penurunan Jumlah PMKS

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (data diolah)

Persentase Penurunan Jumlah PMKS di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 1,81% dari target sebesar 1,75%. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Penurunan Jumlah PMKS Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 1,7% menjadi 1,81%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang

dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 60,33%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” didukung oleh 8 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14 Pencapaian kinerja sasaran Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	385.300.000,00	375.867.860,00	97,55%
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		223.355.000,00	220.814.000,00	98,86%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		2.581.249.500,00	1.863.828.194,00	72,21%
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		95.800.000,00	95.406.800,00	99,59%
5	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo		23.071.000,00	22.071.000,00	95,67%
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		260.682.500,00	256.180.500,00	98,27%
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		2.581.249.500,00	1.863.828.194,00	72,21%
Hasil Akhir			6.150.707.500,00	4.697.996.548,00	76,38%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial;
- 3) Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan terkait penerima manfaat yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
- 2) Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan percepatan penanganan PMKS.
- 3) Meningkatkan jumlah penerima Jaminan Sosial, serta diberlakukannya UMK agar setiap pemberi kerja di Kabupaten Pamekasan dapat melakukan beberapa penyesuaian diantaranya terkait pemayaran iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
- 4) Pemenuhan Ketersediaan Data Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan baik.

Tujuan 3

Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,65	3,49	68,30%	Cukup Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			68,30%	Cukup Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila dilihat dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Tingkat pengangguran terbuka (TPT)”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator kinerja tersebut adalah cukup berhasil, dengan persentase capaian sebesar 68,30%. Realisasi indikator kinerja “Tingkat pengangguran terbuka (TPT)” sebesar 3,49 dari target yang ditetapkan yaitu 2,65.

Sasaran 6

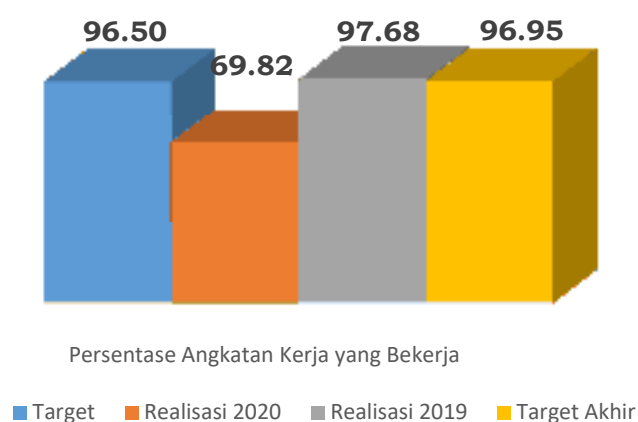
Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	96,5%	69,82%	72,35%	Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			72,35%	Berhasil

Sumber: BPS Kab. Pamekasan, 2021

Capaian sasaran strategis 6 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 72,35% atau tercapai dengan berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja. Realisasi kinerja Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja sebesar 69,82% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,5%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 72,35% atau tercapai dengan berhasil.



Gambar 3. 6 Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja

Sumber: *data diolah, 2021*

Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang berhasil dengan realisasi sebesar 69,82 dari target sebesar 96,50. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 97,68 menjadi 69,82. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 72,02%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Penyerapan Tenaga Kerja” didukung oleh 4 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan tahun 2020

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.918.125.000,00	2.625.157.100,00	89,96%
2	Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan		648.000.000,00	610.660.575,00	94,24%
3	Program		177.500.000,00	26.553.500,00	14,96%

No	Nama Program	PD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Peningkatan Kesempatan Kerja				
4	Perlindungan terhadap tenaga kerja				
Hasil Akhir			3.743.625.000,00	3.262.371.175,00	87,14%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten pamekasan yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja.
2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan.
3. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha.
4. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja.
5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

1. Menyediakan informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*website*, dll).
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pekerjaan.

3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan permintaan (pasar) tenaga kerja.
4. Meningkatkan keamanan untuk menghindari konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja.
5. Optimalisasi pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta memperkuat pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.

Sasaran 7

Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha.

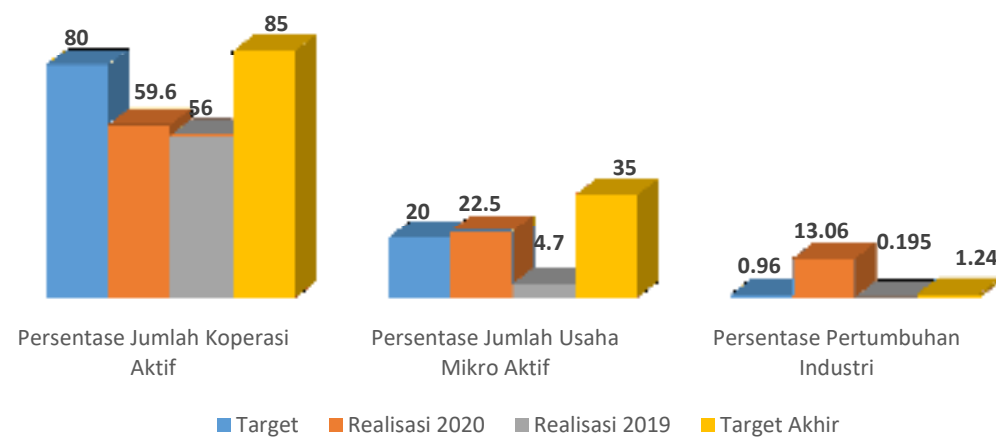
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Jumlah Koperasi Aktif	80	59,6	74,50%	Berhasil
Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	20	22,5	112,50%	Sangat Berhasil
Persentase Pertumbuhan Industri	0,96	13,06	1360,42%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			515,81%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Capaian sasaran strategis 7 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 515,81% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja ini ada 3 macam, yaitu Persentase Jumlah Koperasi Aktif, Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif, dan Persentase Pertumbuhan Industri. Realisasi kinerja Persentase Jumlah Koperasi Aktif sebesar 59,60 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 74,50% atau tercapai dengan berhasil. Selanjutnya, capaian kinerja Persentase Jumlah

Usaha Mikro Aktif mencapai 112,50% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 22,50 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20. Sedangkan capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Industri juga tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai pencapaian sebesar 1360,42%, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 13,06 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,96.



Gambar 3.7 Persentase Jumlah Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 (data diolah).

Persentase Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang berhasil dengan realisasi sebesar 59,6 dari target sebesar 80. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 56 menjadi 59,6. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 70,12%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 22,5

dari target sebesar 20. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif Kabupaten Pamekasan meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, dari 4,7 menjadi 22,5. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 64,29%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 13,06 dari target sebesar 0,96. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 0,195 menjadi 13,06. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja sasaran “Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha” didukung oleh 9 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.19 Pencapaian kinerja sasaran Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	629.060.000,00	593.232.200,00	94,30%
2	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro		50.000.000,00	21.150.000,00	42,30%
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi		111.220.000,00	110.626.332,00	99,47%

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Usaha Mikro				
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		629.060.000,00	593.232.200,00	94,30%
5	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro		50.000.000,00	21.150.000,00	42,30%
6	Program Peningkatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha		200.000.000	199.860.000,00	99,93%
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro		484.180.000,00	452.570.000,00	93,47%
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.369.227.600,00	1.078.532.098,00	78,77%
9	Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial		5.671.300.000,00	4.207.405.100,00	74,19%
Hasil Akhir			9.194.047.600,00	7.277.757.930,00	79,16%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

1. Pelaku usaha kurang memperhatikan kualitas dan kuantitas;
2. Rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha
3. Kurangnya tenaga lapangan yang kompeten
4. Belum seluruhnya koperasi di Kabupaten Pamekasan memiliki sertifikat

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi para pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan dana.
2. Meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.
3. Memberikan pelatihan kepada tenaga lapangan
4. Memberikan penyuluhan dan Pendidikan perkoperasian.

Sasaran 8

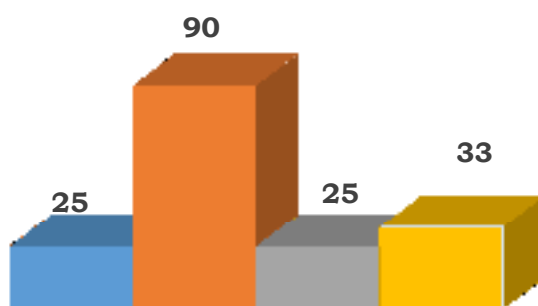
Pengembangan Potensi Wisata berbasis partisipasi masyarakat

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	25	90	360%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			360%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, 2021

Capaian sasaran strategis 8 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 360% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata. Realisasi kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata sebesar 90% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 25%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 360% atau tercapai dengan sangat berhasil.



Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata

■ Target ■ Realisasi 2020 ■ Realisasi 2019 ■ Target Akhir

Gambar 3.8 Peresentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, 2021

Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 25%. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Pamekasan meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 25% menjadi 90%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Pencapaian kinerja sasaran “Pengembangan Potensi Wisata berbasis partisipasi masyarakat” didukung oleh 3 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat

No	Nama Program	PD Penanggung-jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capai-an (%)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	915.120.000,00	766.291.800,00	83,74%
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisata		1.550.000.000,00	1.541.046.710,00	99,42%
3	Program Pengembangan		1.072.225.000,00	1.065.522.500,00	99,37%

No	Nama Program	PD Penanggung-jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capai-an (%)
	Destinasi Wisata				
Hasil Akhir			3.537.345.000,00	3.372.861.010,00	95,35%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

1. Adanya keterbatasan SDM dan sumberdaya lainnya yang seharusnya berkontribusi terhadap berkembang dan tumbuhnya sektor pariwisata,
2. Ketersediaan *data base* kepariwisataan yang belum optimal
3. Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait.
4. Lemahnya pemasaran ke dalam maupun luar negeri
5. Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata.
6. Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang berkontribusi terhadap berkembang dan tumbuhnya sektor pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dana.
2. Optimalisasi ketersediaan *data base* kepariwisataan.
3. Meningkatkan promosi produk dan melakukan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* yang mampu meningkatkan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dana.
5. Meningkatkan pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata melalui Kajian Strategi Pariwisata, promosi, dan lain sebagainya.

Sasaran 9

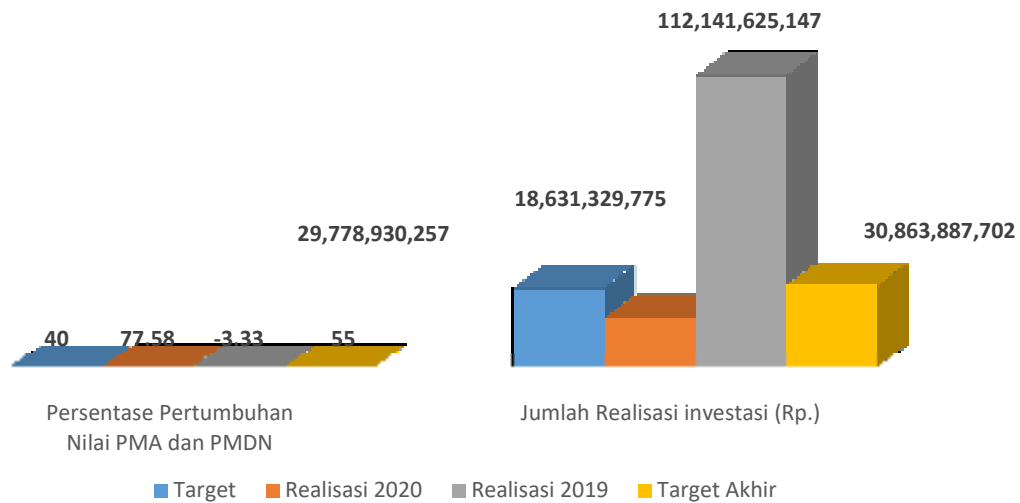
Iklim Investasi yang Kondusif

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	40	77,58	193,95%	Sangat Berhasil
Jumlah Realisasi Investasi (Rp)	29.778.930.257	18,631,329,775	63%	Cukup Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			128,48%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2021

Capaian sasaran strategis 9 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 128,48% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 2 macam, yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN dan Jumlah Realisasi Investasi (Rp). Realisasi kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN sebesar 77,58 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 40, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 193,95% atau tercapai dengan sangat berhasil. Sedangkan, capaian kinerja Jumlah Realisasi Investasi mencapai 63% atau tercapai dengan cukup berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar Rp 18,631,329,775 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp 29.778.930.257.



Gambar 3. 9 Peresentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2021

Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 77,58% dari target sebesar 40%. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pamekasan meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka -3,33% menjadi 77,58%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Jumlah Realisasi Investasi (Rp) di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capain yang cukup berhasil dengan realisasi sebesar 18,631,329,775 dari target sebesar 29.778.930.257. Pada tahun 2020, Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Pamekasan menurun sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 112.141.625.147 menjadi 18,631,329,775. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 60,37%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Iklim Investasi yang Kondusif” didukung oleh 3 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Iklim Investasi dan Kondusif

	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.767.500	96.727.000	97.93%
2	Program Informasi, Pengaduan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal		184.734.000	169.257.880	91.62%
3	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		4.376.323.000	648.020.861	14.81%
4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		1.200.000	207.000	17.25%
Hasil Akhir			4.661.024.500	914.212.741	19.61%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kurangnya promosi investasi daerah dan kerjasama dan pandemi Covid-19

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Melakukan reformasi di bidang penanaman modal sehingga menjadi efisien dan efektif untuk menunjang usaha ekonomi lokal serta menciptakan lapangan usaha melalui investasi di Kabupaten Pamekasan.
- 2) Kepastian hukum di bidang investasi.

- 3) Meningkatkan Promosi dan Kerja Sama Daerah untuk Mendorong Investasi.
- 4) Kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal.
- 5) Meningkatkan infrastruktur pendukung.

Tujuan 4

Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Tujuan 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	11	14,45	115,73%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			115,73%	Sangat Berhasil

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator kinerja tersebut adalah sangat berhasil, dengan persentase capaian sebesar 115,73%. Realisasi indikator kinerja “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah” sebesar 14,45 dari target yang ditetapkan yaitu 11.

Sasaran 10

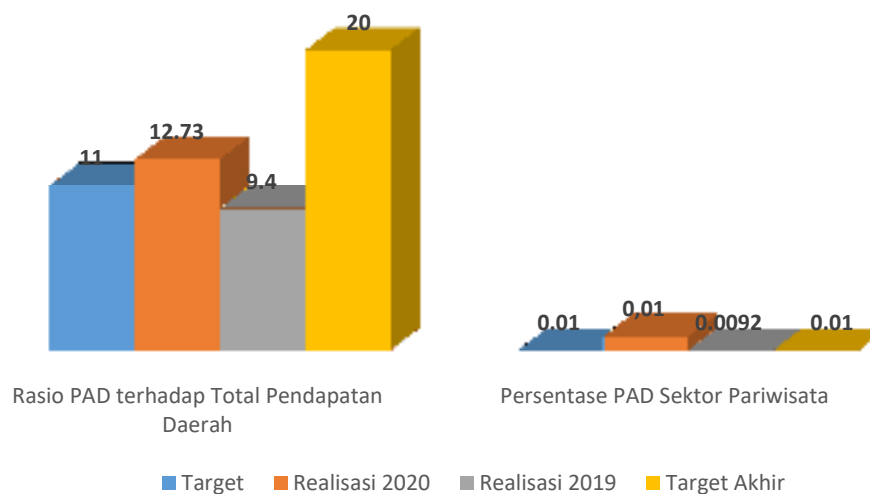
Sumber-Sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	11	12,73	115,73%	Sangat Berhasil
Persentase PAD Sektor Pariwisata	0,01	0,01	100,00%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			107.86%	Sangat Berhasil

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Capaian sasaran strategis 10 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 107.86% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 2 macam, yaitu Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dan Persentase PAD Sektor Pariwisata. Realisasi kinerja Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 12,73 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 11, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 115,73% atau tercapai dengan sangat berhasil. Sedangkan, capaian kinerja Persentase PAD Sektor Pariwisata mencapai 100,00% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 0,01 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,01.



Gambar 3. 10 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 12,73 dari target sebesar 11. Pada tahun 2020, realisasi Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Pamekasan meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 9,4 menjadi 12,73. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 63,65%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Persentase PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 0,01 dari target sebesar 0,01, jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 0,0092 menjadi 0,93. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Pencapaian kinerja sasaran “Sumber-Sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah” didukung oleh 5 program yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran Sumber-sumber Fundamental penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Badan Keuangan Daerah	1.376.808.000	1.250.558.685	90.83%
2	Program Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan		1.500.720.000	1.205.071.300	80.30%
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	915.120.000	766.291.800	83.74%
4	Program Pembinaan		1.550.000.000		99.42

	Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisata			1.541.046.710	%
5	Program Pengembangan Destinasi Wisata		1.072.225.000	1.065.522.500	99.37 %
Hasil Akhir			6.414.873.000	5.828.490.995	90,85%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Adanya keterbatasan SDM dan sumberdaya lainnya yang seharusnya berkontribusi terhadap berkembang dan tumbuhnya sektor pariwisata.
- 2) Ketersediaan *data base* kepariwisataan yang belum optimal.
- 3) Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait.
- 4) Lemahnya pemasaran ke dalam maupun luar negeri.
- 5) Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata.
- 6) Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang berkontribusi terhadap berkembang dan tumbuhnya sektor pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dana.
- 2) Optimalisasi ketersediaan *data base* kepariwisataan.
- 3) Meningkatkan promosi produk dan melakukan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* yang mampu meningkatkan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri.
- 4) Meningkatkan kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dana.
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata melalui Kajian Strategi Pariwisata, promosi, dan lain sebagainya.

Misi 3

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Tujuan 5

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel.

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Tujuan 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	66	Data belum rilis	-	-
Rata-rata capaian kinerja			-	-

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2021

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana reformasi birokrasi tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Reformasi Birokrasi dimasukkan sebagai indikator kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dirilis oleh Kementerian PANRB sehingga belum diketahui capaiannya.

Sasaran 11

Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

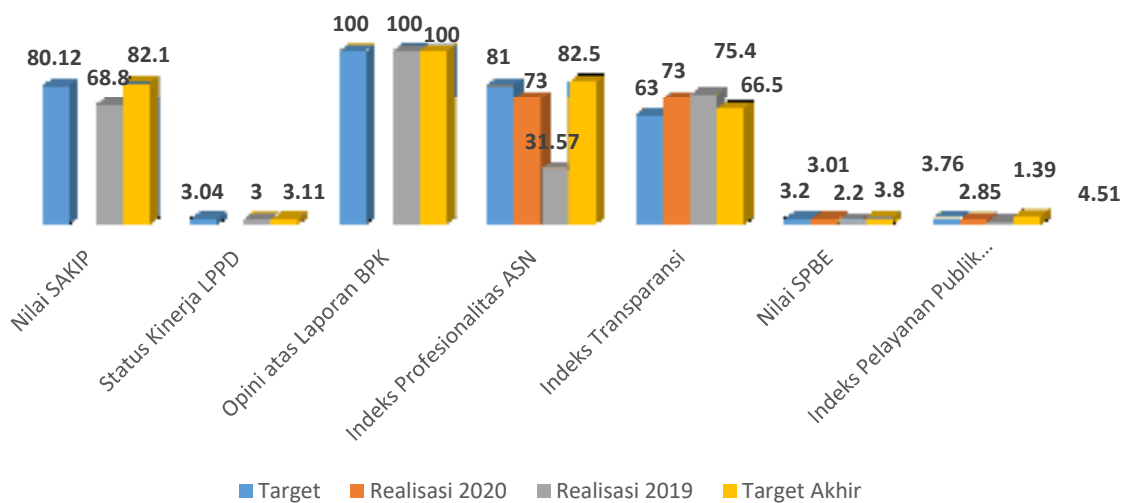
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	80,12	Belum rilis	-	-
Status Kinerja LPPD	3,0400	Belum rilis	-	-
Opini atas Laporan BPK	WTP	Belum rilis	-	Sangat Berhasil
Indeks Profesionalitas ASN	81	73	90,12%	Sangat Berhasil
Indeks Transparansi	63,0	73	115,87%	Sangat Berhasil
Nilai SPBE	3,2	3,01	94,06%	Sangat Berhasil
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76	2,85	75,80%	Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			95,17%	Sangat Berhasil

Sumber: Kementerian PAN dan RB; Kemendagri; BPK RI; BKN RI; Komisi Informasi; Kementerian PAN dan RB, 2021

Capaian sasaran strategis 11 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 4707,87% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 7 macam, yaitu Nilai SAKIP, Status Kinerja LPPD, Opini atas Laporan BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Transparansi, Nilai SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Realisasi kinerja Nilai SAKIP dan Status Kinerja LPPD belum dirilis oleh Kementerian PANRB sehingga belum diketahui capaiannya. Sedangkan, realisasi kinerja dari Indeks Profesionalitas ASN adalah sebesar 73 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 90,12%. Indikator kinerja sasaran selanjutnya adalah indeks transparansi. Realisasi indikator indeks transparansi adalah sebesar 73 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 115,87%. Selanjutnya, realisasi kinerja dari Nilai SPBE sebesar 3,01 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,2, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 94,06% atau tercapai

dengan sangat berhasil. Sedangkan, capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 75,80% atau tercapai dengan berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 2,85 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 3,76.



Gambar 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sumber: Kementerian PAN dan RB; Kemendagri; BPK RI; BKN RI; Komisi Informasi; Kementerian PAN dan RB, 2021(diolah)

Opini BPK Kabupaten Pamekasan tahun 2019, yaitu mendapatkan Opini WTP. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 73 dari target sebesar 81. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 31,57 menjadi 73. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 88,48%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Indeks Transparansi Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 73 dari target sebesar 63. Pada tahun 2020, Indeks Transparansi Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 75,4 menjadi 73. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Nilai SPBE Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 3,01 dari target sebesar 3,2. Pada tahun 2020, Indeks Transparansi Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 2,2 menjadi 3,01. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 79,21%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang berhasil dengan realisasi sebesar 2,85 dari target sebesar 3,76. Pada tahun 2020, Indeks Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 1,39 menjadi 2,85. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 63,19%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” didukung oleh 43 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Percepatan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	2,835,000,000	2,259,120,900	79.69%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Kerja sama		1,461,151,000	1,306,922,165	89.44%
3	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Badan Keuangan Daerah	5,114,410,000	4,695,907,340	91.82%
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3,652,950,000	1,877,816,989	51.41%
5	Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan		1,391,256,400	1,124,820,400	80.85%
6	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah		863,431,400	607,871,503	70.40%
7	Program Peningkatan Kualitas Data dan Pengendalian Sumber Daya Aparatur		179,000,000	108,543,000	60.64%
8	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	990,830,000	354,270,000	35.75%
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		4,110,682,000	3,506,368,000	85.30 %
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1,129,740,000	893,572,000	79.10%
11	Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian		107,000,000	91,489,900	85.50%
12	Program Pengelolaan Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian		159,863,400	135,421,260	84.71%
13	Program Peningkatan Pengembangan Karier		451,788,000	256,985,100	56.88%
14	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika	531,230,700	525,175,599	98.86%
15	Program Pengelolaan Data Statistik		381,509,000	354,480,656	92.92%
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media		283,299,500	232,640,057	82.12%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Massa				
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik		5,657,913,000	5,598,147,400	98.94%
18	Program Penyediaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK		75,000,000	68,526,000	91.37%
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi		103,560,250	101,176,780	97.70%
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	4,595,994,570	4,035,229,976	87.80%
21	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur		762,578,070	648,223,751	85.00%
22	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Dinas sosial	72,000,000	71,170,100	98.85%
23	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,285,258,850	1,175,384,600	91.45%
24	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		546,199,500	450,182,496	82.42%
25	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		414,833,950	399,824,300	96.38%
26	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	21,021,108,931	18,989,672,328	90.34%
27	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Kecamatan Pamekasan	3,143,138,200	3,101,237,550	98.67%
28	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan		91,440,000.00	91,410,000	99.97%
29	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan		3,143,138,200	3,101,237,550	98.67%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Umum				
Hasil Akhir			90.070.304.921	56.162.827.700	62,35%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing OPD, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya.
- 2) Survei kepuasan masih menggunakan metode yang menggabungkan antara ilmiah dan regulasi, sehingga hasil survei belum tepat dan akurat untuk mengukur nilai sesungguhnya.
- 3) Motivasi dan semangat perangkat daerah dalam melakukan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga perubahan peningkatan kualitas pelayanan masih rendah dan berdampak terhadap nilai kepuasan masyarakat yang diperoleh

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Kebijakan setiap OPD melakukan survei kepuasan masyarakat pada setiap layanannya secara periodik dan melaporkan ke sekretaris daerah dan mempublikasikan hasil akhirnya (IKM).
- 2) Memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan program review dan penyesuaian standar pelayanan dengan pelibatan masyarakat (*citizen charter*).
- 4) Meningkatkan intensitas koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publiknya.
- 5) Menyediakan dan mengelola sarana pengaduan masyarakat.
- 6) Mendorong inovasi pelayanan setiap perangkat daerah terutama inovasi dalam pelayanan publik.

- 7) Mensosialisasikan kebijakan evaluasi pelayanan secara berkala.

Sasaran 12

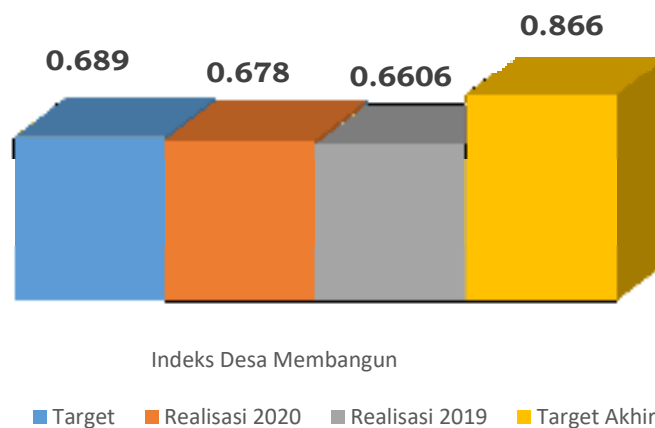
Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik.

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Desa Membangun	0,698	0,678	97,1%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			97,1%	Sangat Berhasil

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021

Capaian sasaran strategis 12 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 89% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Indeks Desa Membangun. Realisasi kinerja dari Indeks Desa Membangun adalah sebesar 0,678 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,698, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 97,1% atau tercapai dengan sangat berhasil.

**Gambar 3. 12 Indeks Desa Membangun Kabupaten Pamekasan tahun 2020**

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021 (data diolah)

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 0,678 dari target sebesar 0,698. Pada tahun 2020, nilai Indeks Desa Membangun

Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 0,6606 menjadi 0,678. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 63,19%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik” didukung oleh 5 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	324,306,600	314,644,380	97.02%
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		622,895,700	537,496,540	86.29%
3	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat		35,907,239,000	34,938,038,191	97.30%
4	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		15,543,132	15,543,132	100%
5	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa		1,191,890,050	483,288,131	40.55%
Hasil Akhir			38.061.874.482	36.289.010.374	95,34%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kesulitan mencari potensi desa meskipun telah melakukan studi banding ke daerah lain. Dikarenakan sebagian besar potensi desa tidak sama dengan desa yang menjadi tempat studi lapangan sehingga hasilnya tidak optimal.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Membuat sistem yang mampu memastikan bahwa laporan pengerjaan tahap sebelumnya terpenuhi oleh masing-masing desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi atau melalui sistem *online*, serta melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- 2) Memberikan pelatihan dan motivasi kepada Kepala Desa untuk membentuk dan mengelola BUMDes.

Misi 4

Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.

Tujuan 6

Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak Bagi Masyarakat.

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Tujuan 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Infrastruktur	72,5	belum rilis	-	-
Rata-rata capaian kinerja			-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2021

Sasaran 13

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

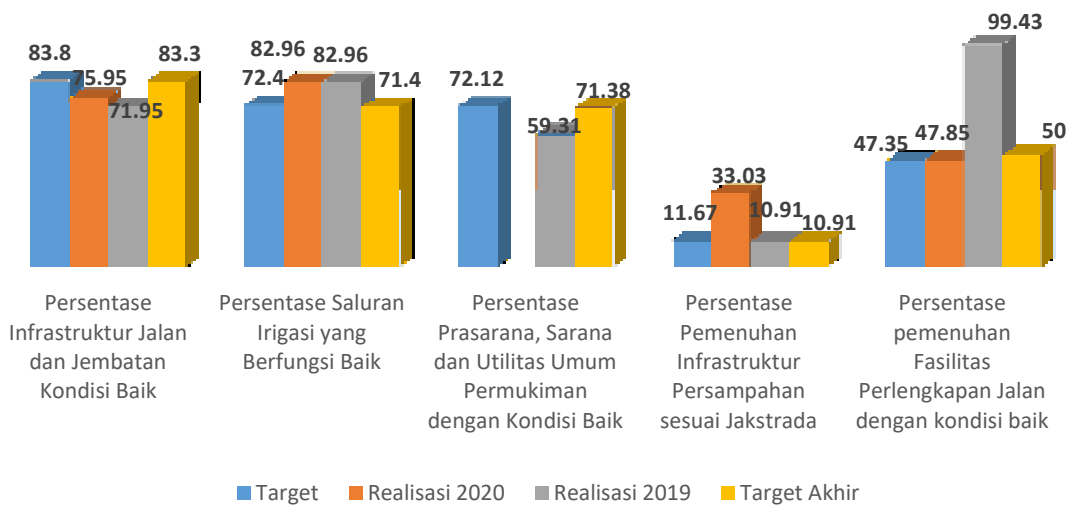
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	83,8	75,95	90,63%	Sangat Berhasil
Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	72,4	82,96	114,59%	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	72,12	belum rilis	-	-
Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	11,67	33,03	283,03%	Sangat Berhasil
Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	47,35	47,85	101,06%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			147,33%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan, 2021

Capaian sasaran strategis 13 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 147,33% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 5 macam, yaitu Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik, Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada, dan Persentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Kondisi Baik. Realisasi kinerja Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik sebesar 75,95 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,8, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 90,63% atau tercapai dengan sangat berhasil. Selanjutnya, realisasi kinerja dari Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik sebesar 12,73 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,4, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 114,59% atau tercapai dengan sangat berhasil. Sedangkan, realisasi kinerja dari Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik adalah belum diketahui nilainya sehingga belum dihitung capaian kinerjanya. Indikator kinerja sasaran selanjutnya adalah Persentase Pemenuhan Infrastruktur

Persampahan sesuai Jakstrada. Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada adalah sebesar 33,03 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 11,67, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 283,03%. Selanjutnya, realisasi kinerja dari Persentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Kondisi Baik sebesar 47,85 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 47,35, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,06% atau tercapai dengan sangat berhasil.



Gambar 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Sumber: Sumber: Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan, 2021

Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 75,95 dari target nilai sebesar 83,8. Pada tahun 2020, Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 71,95 menjadi 75,95. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 91,18%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 82,96 dari target sebesar 72,4. Pada tahun 2020, Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik di Kabupaten Pamekasan stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Persentase pemenuhan infrastruktur persampahan sesuai Jakstrada di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 33,03 dari target sebesar 11,67. Pada tahun 2020, Persentase pemenuhan infrastruktur persampahan sesuai Jakstrada di Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 10,91 menjadi 33,03. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 47,85 dari target sebesar 47,35. Pada tahun 2020, Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Pamekasan menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 99,43 menjadi 47,85. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 95,70%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar” didukung oleh 21 program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan	131.058.165.623	50.484.719.600	38,52%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	dan Jembatan	Umum dan Penataan Ruang			
2	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		94.518.765.075	54.700.053.400	57,87%
3	Program Penataan Ruang		551.271.500	468.513.836	84,99%
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum		14,579,042,600	11,948,577,947	81,96%
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		15,507,711,300	14,333,579,699	92.43%
6	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		2,032,750,000	1,842,680,121	90.65%
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya		1,712,381,000	1,487,108,400	86.84%
8	Program Pengendalian Banjir		8,734,419,770	8,266,816,290	94.65%
9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	698,466,000	603,743,800	86.44 %
10	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan		123.503.752.700	117,543,007,750	95.17%
11	Program Penataan bangunan dan lingkungan		2,450,000,000	1,979,604,750	80.80%
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		42,013,793,550	36,323,389,000	86.46%
13	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	Dinas Lingkungan Hidup	100,860,000	0.00	0.00%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	642,646,600	595,950,179	92.73%
15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		390,000,000	385,987,157	98,97 %
16	Program peningkatan pelayanan angkutan		5,330,500	4,199,500	78.78 %
17	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		413,460,000	412,130,000	99.68 %
18	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		510,000,000	503,139,000	98.65%
19	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum		11,897,200,000	11,798,835,873	99.17%
20	Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan		5,109,150,000	5,092,691,000	99.68%
21	Program Peningkatan Tata Kelola Perhubungan		0	0	0%
			456.429.166.218	318.774.727.302	69,84%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri
- 2) Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan
- 3) Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air
- 4) Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan

- 5) Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.
- 6) Terlaksananya *Refocusing* dana demi memenuhi kebijakan penanganan pandemi COVID-19
- 7) Lokasi titik sumber mata air belum dapat dan keterbatasan waktu kegiatan
- 8) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Penetapan jaringan jalan strategis pendukung konektivitas status jalan yang lebih tinggi dan pendukung aksesibilitas pengembangan kawasan.
- 2) Peningkatan struktur dan kapasitas jaringan jalan strategis pendukung aksesibilitas pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, secara bertahap berkelanjutan.
- 3) Peningkatan keterlibatan pihak ketiga (konsultan) dalam perencanaan teknis dan pengawas di lapangan.
- 4) Pemberdayaan Petani Pemakai Air terutama dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi, berupa pelatihan kepada petani untuk memberikan pemahaman tentang pemakaian air irigasi.
- 5) Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai serta penanaman tanaman bakau pada daerah pantai.
- 6) Peningkatan kualitas SDM dengan diklat, workshop dan penambahan SDM yang sesuai latar belakang pendidikan baik di ketatausahaan, maupun masing-masing bidang.
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.

8) Perlu adanya pengadaan fasilitas perlengkapan jalan.

Sasaran 14

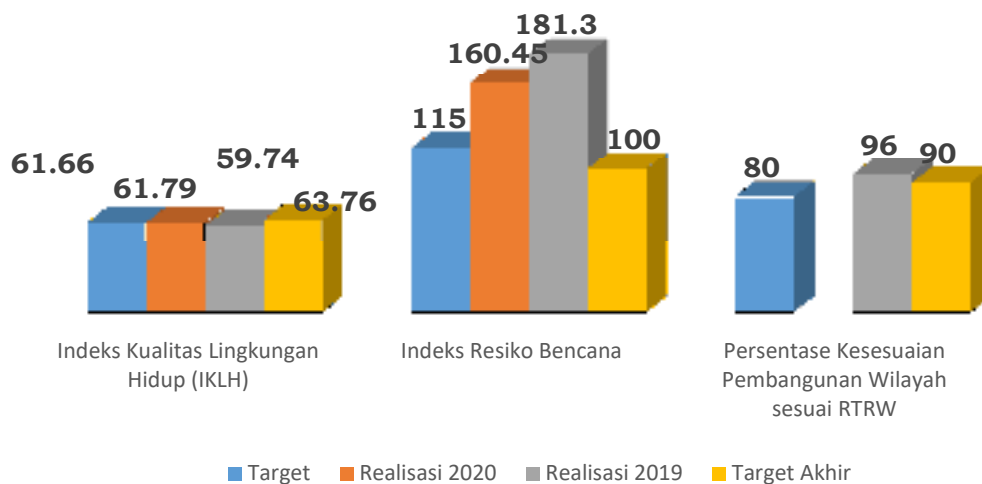
Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu, dan Tangguh

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,96-61,66	61,79	100,21%	Sangat Berhasil
Indeks Resiko Bencana	115	160,45	139,52%	Sangat Berhasil
Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW	80	98	123%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			120,67%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR, 2021

Capaian sasaran strategis 14 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 120,67% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja ini ada 3 macam, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Resiko Bencana, dan Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 61,79 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 60,96-61,66, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,21% atau tercapai dengan berhasil. Selanjutnya, capaian kinerja Indeks Resiko Bencana mencapai 139,52% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 160,45 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 115. Sedangkan capaian kinerja Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW juga tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai pencapaian sebesar 123%, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 98 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 80.



Gambar 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 61,79 dari target nilai sebesar 61,66. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 59,74 menjadi 61,79. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 97,99%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 160,45 dari target sebesar 115. Pada tahun 2020, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 181,3 menjadi 160,45. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 73 dari target sebesar 80. Pada tahun 2020,

realisasi Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 96 menjadi 73. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 88,48%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu, dan Tangguh” didukung oleh 12 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	891,074,000.00	853,756,750.00	95.81%
2	Program Penaatan dan peningkatan Kapasitas LH		315,832,750.00	237,564,250.00	75.22%
3	Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium		171,303,000.00	146,331,000.00	85.42%
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup		600,000,000.00	588,533,000.00	98.09%
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		50,000,000.00	43,991,825.00	87.98%
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan B3		11,411,833,102.00	10,129,290,746.00	88.76%
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),		3,446,981,250.00	3,385,199,400.00	98.21%
8	Program		3,033,716,000.00	2,602,700,940.00	85.79%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Peningkatan Tata Lingkungan				
9	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		75,000,000.00	5,410,000.00	7.21%
10	Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik		483,930,000.00	381,922,500.00	78.92%
11	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana),		5,378,976,000.00	5,180,981,500.00	96.32%
12	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup		977,625,000.00	948,642,721.00	97.04%
Hasil Akhir			26.836.271.102	24.504.324.632	91,31%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum kuat, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran izin dll.
- 2) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran, terutama dalam pengelolaan limbah domestik (limbah cair dan sampah rumah tangga);
- 3) Ketersediaan Pejabat Penyidik PNS di bidang lingkungan hidup yang masih minim, sehingga proses penyelesaian kasus hukum lingkungan sering terhenti dan tidak selesai.

- 4) Keterbatasan pendanaan dalam memenuhi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membutuhkan besarnya keterlibatan tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Keterbatasan waktu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyebabkan rendahnya keragaman karakteristik wilayah yang akan ditemui.
- 6) Ketidak tercapaian kinerja dan anggaran disebabkan karena ada tambahan PAK yang menyebabkan keterbatasan waktu dalam pengerjaannya, sehingga dijadwal ulang pada tahun anggaran 2020.

Berbagai solusi kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan salah satunya dengan meningkatkan capaian ruang terbuka hijau (RTH) Publik di wilayah Kabupaten Pamekasan. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi dalam rangka menyadarkan akan bahaya kerusakan lingkungan dan pelatihan penggalakan program 4R: *reduce, reuse, recycle* dan *recovery* pada masyarakat.
- 2) Melaksanakan pengawasan, pembinaan serta sosialisasi pada dunia usaha agar mematuhi ketentuan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Lingkungan Hidup untuk bersinergi dalam proses preventif dan penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
- 4) Menambah tenaga PPNS lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan penyelesaian proses tindak pidana lingkungan yang terjadi.

- 5) Pemenuhan dana/biaya dalam penyusunan turunan RTRW dan dokumen perencanaan strategis lainnya yang dibutuhkan (Kegiatan yang dianggarkan).
- 6) Meningkatkan kualitas perencanaan RTRW dengan mengoptimalkan waktu Perencanaan penyusunan dokumen RTRW lainnya.

Misi 5

Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera

Tujuan 7

Meningkatkan Harmonisasi Sosial Melalui Optimalisasi Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Tujuan 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesalehan Sosial	74,56	81,31	109,05%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			109,05%	Sangat Berhasil

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2021

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimana kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan “Indeks Kesalehan Sosial”, diperoleh kesimpulan bahwa capaian

indikator kinerja tersebut adalah sangat berhasil, dengan persentase capaian sebesar 109,05%. Realisasi indikator kinerja “Indeks Kesalehan Sosial” sebesar 81,31 dari target yang ditetapkan yaitu 74,56.

Sasaran 15

Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik

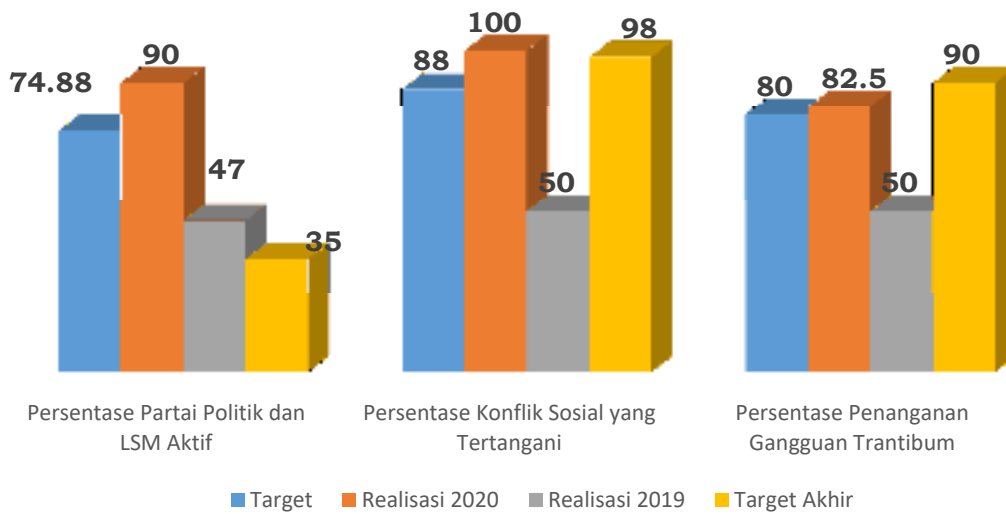
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	74,88	90	120,19%	Sangat Berhasil
Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	88	100	113,64%	Sangat Berhasil
Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80	82,5	103,13%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			112,32%	Sangat Berhasil

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP Kabupaten Pamekasan, 2021

Capaian sasaran strategis 15 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 112,32% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja ini ada 3 macam, yaitu Persentase Partai Politik dan LSM Aktif, Persentase Konflik Sosial yang Tertangani, dan Persentase Penanganan Gangguan Trantibum. Realisasi kinerja Persentase Partai Politik dan LSM Aktif sebesar 90 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 74,88, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 120,19% atau tercapai dengan sangat berhasil. Selanjutnya, capaian kinerja Persentase Konflik Sosial yang Tertangani mencapai 113,64% atau tercapai dengan sangat berhasil, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 100 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 88. Sedangkan capaian kinerja Persentase Penanganan Gangguan Trantibum juga tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai pencapaian sebesar 103,13%, yang mana

memiliki angka realisasi sebesar 82,5 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 80.



Gambar 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP Kabupaten Pamekasan, 2021

Persentase Partai Politik dan LSM Aktif di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 90 dari target nilai sebesar 74,88. Pada tahun 2020, Persentase Partai Politik dan LSM Aktif di Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 47 menjadi 90. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Persentase Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 100 dari target sebesar 88. Pada tahun 2020, Persentase Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Pamekasan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari 50 menjadi 100. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Persentase Penanganan Gangguan Trantibum di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 82,5 dari target sebesar 80. Pada tahun 2020, realisasi Persentase Penanganan Gangguan Trantibum di Kabupaten Pamekasan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 50 menjadi 82,5. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 91,67%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik” didukung oleh 7 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Bakesbangpol	200,000,000.00	122,454,250.00	61.23%
2	program Kajian Strategis dan Kewaspadaan Nasional		321,835,000.00	307,402,500.00	95.52%
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		365,000,000.00	289,833,840.00	79.41%
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP	95,000,000.00	88,326,400.00	92.98%
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		2,445,187,500.00	2,135,338,600.00	87.33%
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		0	0	0%

No	Nama Program	PD Penanggung jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
7	Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah		741,519,800.00	673,746,522.00	90.86%
Hasil Akhir			4.168.542.300	3.617.102.112	86,77%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Pelibatan tenaga satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan sosial (siskamling) belum maksimal.
- 2) Belum optimalnya peran serta dan dukungan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan pengawasan ketertiban dan ketentraman sosial.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Memaksimalkan pelibatan tenaga satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan sosial (siskamling).
- 2) Optimalisasi peran serta dan dukungan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan pengawasan ketertiban dan ketentraman sosial.

Sasaran 16

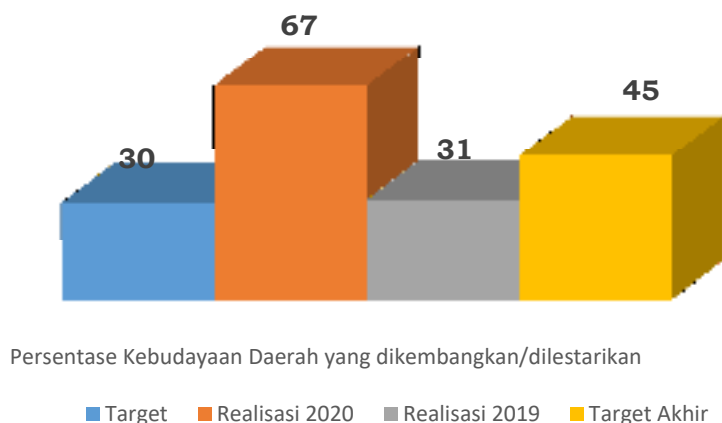
Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan	30	67	223,33%	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			223,33%	Sangat Berhasil

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, 2021

Capaian sasaran strategis 16 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 223,33% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan. Realisasi kinerja dari Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan adalah sebesar 67 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 30, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 223,33% atau tercapai dengan sangat berhasil.

**Gambar 3.16 Capaian sasaran strategis 16**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2021

Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 67 dari target nilai sebesar 30. Pada tahun

2020, Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan di Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 31 menjadi 67. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka target akhir RPJMD sudah tercapai ditahun 2020.

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan

No	Nama Program	PD Penanggung-Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	2,293,750,000	1,464,557,257.00	63.85
Hasil Akhir			2,293,750,000	1,464,557,257.00	63.85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Pencapaian kinerja sasaran “Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan” didukung oleh 1 program yaitu Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Munculnya potensi-potensi perpecahan dan konflik antar agama di masyarakat.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Diadakan deklarasi kerukunan antarumat Bergama sebagai bentuk kepedulian akan pentingnya merajut kembali nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama, serta diadakan dialog lintas agama yang digelar dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan.

Sasaran 17

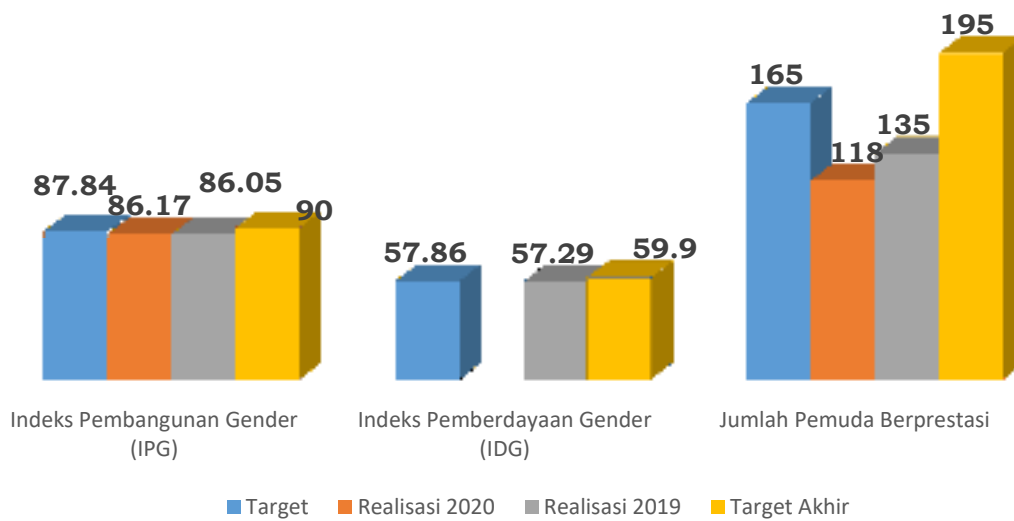
Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,84	86,17	98%	Sangat Berhasil
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,86	Belum rilis	-	-
Jumlah Pemuda Berprestasi	165	118	71,52%	Berhasil
Rata-rata capaian kinerja			112,32%	

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan; dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2021

Capaian sasaran strategis 17 menunjukkan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 112,32% atau tercapai dengan sangat berhasil. Indikator kinerja pada sasaran ini ada 3, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG dan Jumlah Pemuda Berprestasi. Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,17 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,84, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 98% atau tercapai dengan sangat berhasil. Selanjutnya, capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) datanya belum dirilis oleh BPS. Sedangkan capaian kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi juga tercapai dengan kategori berhasil dengan nilai pencapaian sebesar 71,52%, yang mana memiliki angka realisasi sebesar 118 dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 165.



Gambar 3.17 Capaian sasaran strategis 17

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan; dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Jumlah Pemuda Berprestasi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang sangat berhasil dengan realisasi sebesar 86,17 dari target nilai sebesar 87,84. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pamekasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 86,05 menjadi 86,17. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 95,74%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pamekasan tahun 2020 datanya belum dirilis oleh BPS. Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan capaian yang berhasil dengan realisasi sebesar 118 dari target sebesar 165. Pada tahun 2020, realisasi Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pamekasan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari angka 135 menjadi 118. Sedangkan jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020 ini adalah sebesar 60,51%, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja sasaran “Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik” didukung oleh 8 Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Sasaran Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	716,915,000.00	708,460,469.00	98.82%
2	Program Keluarga Berencana		3,991,187,000.00	3,229,474,076.00	80.92%
3	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri		2,217,290,000.00	2,214,600,000.00	99.88%
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		0	0	0%
5	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	570,000,000.00	424,720,000.00	74.51%
6	Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.		0	0	0%
7	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	0	0	0%
8	Program Ketahanan Keluarga		394,310,000.00	379,725,000.00	96.30%
Hasil Akhir			7.889.702.000	6.956.979.545	88,17%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kurangnya tenaga fungsional khusus di lapangan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan sehingga berpengaruh terhadap pembinaan dan pendampingan bagi perempuan.
- 2) Kurangnya tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi program kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih kurangnya fasilitasi bagi perempuan, anak dan remaja.
- 3) Sarana dan prasarana operasional pergerakan masyarakat yang kurang memadai.
- 4) Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta.
- 5) Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat Kepada kabupaten dalam pelaksanaan program KB belum optimal.
- 6) Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah.
- 7) Masih rendahnya kualitas atlet.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional khusus di lapangan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan sehingga berpengaruh terhadap pembinaan dan pendampingan bagi perempuan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi program kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana terdapat minimal 1 (satu) lembaga pendampingan tingkat kecamatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi bagi perempuan, anak dan remaja.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pergerakan masyarakat.

- 4) Dukungan APBD untuk peningkatan akses dan kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan adanya dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak.
- 5) Optimalisasi dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitasi dan pelatihan guna meningkatkan usaha dan ketrampilan perempuan.
- 6) Meningkatkan sarana prasarana olahraga di daerah.
- 7) Meningkatkan prestasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olah raga dengan indikator jumlah persentase pemuda berprestasi mencapai 135%, dimana selisih 15% untuk mencapai target sasaran kinerja, maka dinas Kepemudaan dan Olah Raga harus melakukan evaluasi dan *refocusing* program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian prestasi olah raga secara maksimal. Pemerintah Daerah juga harus memberikan perhatian pada OPD ini di tahun-tahun mendatang.

3.2.2 Prestasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Prestasi Kabupaten Pamekasan tahun 2020 merupakan pendukung dari capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan terlihat dari beberapa prestasi yang diperoleh selama tahun 2020. Prestasi tersebut dapat dilihat dari beberapa penghargaan-penghargaan yang telah diterima dari pemerintah pusat, lembaga independen dan organisasi internasional. Hal tersebut sebagai berikut:

1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Tim Panel Independen mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Salah satu inovasi yang terpilih yaitu "**Edukasi Sayuran Sehat Lahirkan Generasi Hebat**

(Es SELASIH)". Inovasi terpilih itu tertuang pada Surat Pengumuman No: B/153/PP.00.05/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2020. Instansi pemerintah yang berhasil masuk daftar Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 terdiri dari 11 kementerian, 9 lembaga, 9 pemerintah provinsi, 42 pemerintah kabupaten, dan 15 pemerintah kota. Sedangkan instansi pemerintah yang berhasil masuk daftar 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020 terdiri dari 1 kementerian, 1 lembaga, 3 pemerintah provinsi, 4 pemerintah kabupaten, 4 pemerintah kota, dan 1 BUMN.



Gambar 3.18 Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

2) **Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI 6 Tahun berturut-turut**

Pemerintah Kabupaten Pamekasan meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, kepada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam dan Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman di Kantor Perwakilan BPK Jatim, Juanda Sidoarjo pada Jumat (26/6/2020).



Gambar 3.19 Penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI 6 Tahun berturut-turut

3) **Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendapat penghargaan dari BPKP atas prestasi dan capaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan di Gedung Graha di Provinsi Jawa Timur pada hari Senin 20 Januari 2020.



Gambar 3.20 Penghargaan Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

4) Kabupaten dengan Pelayanan Baik dan Menginspirasi di Masa Pandemi pada Ajang Anugerah “INDONESIA AWARD 2020”

Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meraih penghargaan Pelayanan Masyarakat saat Pandemi pada Malam Anugerah Indonesia Awards 2020. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (7/10/2020).



Gambar 3.21 Penghargaan Kabupaten dengan Pelayanan Baik dan Menginspirasi di Masa Pandemi pada Ajang Anugerah “INDONESIA AWARD 2020”

5) IGA 2020 Kabupaten Sangat Inovatif dari Menteri Dalam Negeri

Pamekasan mendapat piagam penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2020 di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (18/12). Pemberian penghargaan tersebut berdasar pada Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020. Tahapan penjaringan dan input data kerja inovasi pemerintah daerah se-Indonesia dilakukan secara online dan dimulai sejak 14 Mei 2020.

IGA diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri. Menggunakan aplikasi IID di Kemendagri. Sementara pengukuran IID ini melibatkan setidaknya 15 dewan juri dari berbagai lembaga kementerian terkait dan sejumlah lembaga kredibel. Ada tiga kategori penghargaan dalam IGA 2020. Pertama, Daerah Sangat Inovatif sebagai penghargaan tertinggi. Kedua, Daerah Terinovatif. Ketiga, Daerah Tertinggal Terinovatif. Kabupaten Pamekasan meraih peringkat pertama bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.



Gambar 3. 22 Penghargaan IGA 2020 Kabupaten Sangat Inovatif dari Menteri Dalam Negeri

6) *The Best On Communication* dalam Ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) Angkatan 5 dan 6 Tahun 2020 dari SINDO MEDIA

Bupati Pamekasan Badrut Tamam meraih penghargaan *The Best on Communication* dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) angkatan 5 dan 6 tahun 2020 yang digelar SINDO Media. Penghargaan ini diserahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik kepada Badrut Tamam pada malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader di Lido Lake Resort, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/2/2020).

Adapun tim juri IVL adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.



Gambar 3.23 The Best On Communication dalam Ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) Angkatan 5 dan 6 Tahun 2020 dari SINDO MEDIA

7) BUMDes terbaik III dalam Lomba BUMDes Jawa Timur

Penghargaan dari Gubernur Jatim kepada BUMDes Delta Mulia sebagai BUMDes terbaik III dalam Lomba BUMDes Jawa Timur, atas nama Desa Panempan Kecamatan Pamekasan. Penghargaan itu beberapa hari lalu diterima oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

8) Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kabupaten Pamekasan, Madura mendapat penghargaan 'Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik)' dari Pemprov Jatim. Dalam pemberian penghargaan itu, Pamekasan mendapat dua katagori, yakni ketabahan pangan dan kategori pendidikan. Untuk katagori ketahanan pangan, Pamekasan meraih Top 25 Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2019 dengan program inovasi yang diberi nama Siii Papa Baru.

Sedangkan untuk kategori Bidang Pendidikan, Pamekasan mendapat penghargaan berkah membuat program inovasi 'Modal Gizi' (Motivasi Medali Bergilir untuk Meningkatkan Prestasi Siswa). Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul Siii Papa Baru Antar Pamekasan Raih Penghargaan Top 25 Inovasi Pelayanan.



Gambar 3. 24 Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dilakukan untuk mengetahui trend pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.44 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Selisih
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,94	66,26	0,32
2	Indeks Pendidikan	Poin	0,59	0,60	0,01
3	Indeks Minat Baca Daerah	Poin	2,38	0,80	-1,58
4	Indeks Kesehatan	Poin	0,73	0,73	0
5	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	-2,54	-7,46
6	Gini Rasio	Poin	0,332		
7	Persentase Penduduk Miskin	%	13,95	14,60	-0,65
8	Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	32,71	32,50	-0,21
9	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	%	6,77	6,77	0
10	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	%	22,26	20,17	-2,09
11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	68,49	70,69	2,2
12	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	68,20	70,5	2,3
13	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,7	1,81	0,11
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Poin	2,32	3,49	-1,17
15	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	97,68	69,82	-27,86
16	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	%	56	59,6	3,6
17	Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	%	4,7	22,5	17,8
18	Persentase Pertumbuhan Industri	%	0,195	13,06	12,865
19	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	%	25	90	65
20	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	-3,33	77,58	80,91
21	Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	Rp.	112.141.625.147	18.631.329.775	-93.510.295.372
22	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	-	14,45	5,05
23	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	%	9,4	12,73	3,33
24	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,0092	0,93	0,9208
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60,06	Belum rilis	-
26	Nilai SAKIP	Skala	68,80 (B)	Belum rilis	-
27	Status Kinerja LPPD	Skala	3,00 (ST)	Belum rilis	-
28	Opini atas Laporan BPK	Skala	WTP	Belum rilis	-
29	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	31,57	73	41,43
30	Indeks Transparansi	Poin	75,4	73	-2,4
31	Nilai SPBE	Poin	2,2	3,01	0,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Selisih
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
32	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	1,39 (D)	2,85	1,46
33	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6606	Belum rilis	-
34	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	58,76	Belum rilis	-
35	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	%	71,95	75,95	4
36	Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	%	82,96	82,96	0
37	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	%	59,31	Belum rilis	-
38	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	%	10,91	33,03	22,12
39	Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	%	99,43	47,85	-51,58
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,74	61,79	2,05
41	Indeks Resiko Bencana	Poin	181,30	160,45	-20,85
42	Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW.	%	96	98	2
43	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	NA	81,31	-
44	Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	%	47	90	43
45	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani.	%	50	100	50
46	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	50	82,5	32,5
47	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan	%	31	67	36
48	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,05	86,17	0,12
49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	57,29		
50	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	135	118	-17

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 pada indikator kinerja utama rata-rata mengalami penurunan capaian. dimana terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaian ditahun 2020 sangat rendah dibandingkan tahun 2019 seperti indeks minat baca daerah, Indeks Resiko Bencana, Jumlah Pemuda Berprestasi, dimana indeks minat baca daerah pada tahun 2019 dengan tahun 2020 terdapat selisih capaian sebesar -1,58. Indeks Resiko Bencana pada tahun 2019 mencapai 181,30 lalu

mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 160,45 sehingga terdapat selisih sebesar - 20,85. Presentase Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019 mencapai 4,92% mengalami penurunan ditahun 2020 mencapai -2,54 dengan selisih -7,46%. Lalu persentase penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 13,95% menungkat menjadi 14,60% ditahun 2020 sehingga terdapat selisih - 0,65%. Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ditahun 2019 mencapai 32,71% mengalami penurunan ditahun 2020 mencapai 32,50 sehingga terdapat selisih sebesar -0,21%. Dan masih terdapat beberapa indikator kinerja utama tahun 2020 yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2019.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD dilakukan untuk mengetahui pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2020 dengan target Akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan Tahun Terakhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,26	68,15	97,23%
2	Indeks Pendidikan	Poin	0,60	0,72	83,33%
3	Indeks Minat Baca Daerah	Poin	0,80	0,78	102,56%
4	Indeks Kesehatan	Poin	0,73	0,8	91,25%
5	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,54	6,00	-42,33%
6	Gini Rasio	Poin	0,32	0,25	78,13%
7	Persentase Penduduk Miskin	%	14,60	10,97	66,91%
8	Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	32,50	35,26	92,17%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
9	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	%	6,77	6,86	98,69%
10	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	%	20,17	22,61	89,21%
11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	70,69	83,75	84,41%
12	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	70,5	84,75	83,19%
13	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,81	3	60,33%
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Poin	3,49	2,00	25,50%
15	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	69,82	96,95	72,02%
16	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	%	59,6	85	70,12%
17	Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	%	22,5	35	64,29%
18	Persentase Pertumbuhan Industri	%	13,06	1,24	1053,23%
19	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	%	90	33	272,73%
20	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	77,58	55	141,05%
21	Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	Rp.	18.631.329.775	30.863.887.702	60,37%
22	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	14,45	20,00	72,25%
23	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	%	12,73	20	63,65%
24	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,01	0,01	100,00%
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Belum rilis	81	-
26	Nilai SAKIP	Skala	Belum rilis	82,1 (A)	-
27	Status Kinerja LPPD	Skala	Belum rilis	3,11 (ST)	-
28	Opini atas Laporan BPK	Skala	Belum rilis	WTP	100,00%
29	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	73	82,5	88,48%
30	Indeks Transparansi	Poin	73	66,5	109,77%
31	Nilai SPBE	Poin	3,01	3,8	79,21%
32	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	2,85	4,51 (A)	63,19%
33	Indeks Desa Membangun	Poin	Belum rilis	0,866	-
34	Indeks Pembangunan	Poin	Belum rilis	85	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	Infrastruktur				
35	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	%	75,95	83,30	91,18%
36	Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	%	82,96	71,40	116,19%
37	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	%	Belum rilis	71,38	-
38	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	%	33,03	10,91	302,75%
39	Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	%	47,85	50,00	95,70%
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,79	63,06-63,76	97,99%
41	Indeks Resiko Bencana	Poin	160,45	100	160,45%
42	Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW.	%	98	90	108,88%
43	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	81,31	76,15	106,78%
44	Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	%	90	35	257,14%
45	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani.	%	100	98	102,04%
46	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	82,5	90	91,67%
47	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan	%	67	45	148,89%
48	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,17	90	95,74%
49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Belum rilis	59,9	-
50	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	118	195	60,51%

Berdasarkan data pada tabel 3.45 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 12 Indikator yang realisasinya sudah mencapai target akhir RPJMD, seperti Indeks Minat Baca, Persentase Pertumbuhan Industri,

Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata, Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN, Persentase PAD Sektor Pariwisata, Opini atas Laporan BPK, Indeks Transparansi, Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada, Indeks Risiko Bencana, Indeks Kesalehan Sosial, dan Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan. Sedangkan, untuk 38 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Pamekasan dengan Standar Provinsi dan Nasional tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pamekasan	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,26	71,71	71,94
2	Indeks Pendidikan	Poin	0,6	107,78	-
3	Indeks Minat Baca Daerah	Poin	0,8	NA	-
4	Indeks Kesehatan	Poin	0,73	-	-
5	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,54	3,04	2,97
6	Gini Rasio	Poin		0,37	0,38
7	Persentase Penduduk Miskin	%	14,6	11,46	10,19
8	Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	32,5	-	-
9	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perindustrian	%	6,77	-	-
10	Distribusi Persentase PDRB Kategori Perdagangan	%	20,17	-	-
11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	70,69	-	-
12	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	70,5	-	-
13	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,81	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pamekasan	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	3,49	4,99	7,07%
15	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	69,82	54,56%	-
16	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	%	59,6	6%/22 464	127 124
17	Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	%	22,5	-	-
18	Persentase Pertumbuhan Industri	%	13,06	-	-
19	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Pariwisata	%	90	-	-
20	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	77,58	-	-
21	Jumlah Realisasi Investasi (Rp.)	Rp.	18.631.329.775	611,6 triliun	58,85 triliun
22	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	14,45	-	-
23	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	%	12,73	1,10%	1,50%
24	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,93	-	-
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	63,70%	73,66%
26	Nilai SAKIP	Skala	-	-	A
27	Status Kinerja LPPD	Skala	-	-	-
28	Opini atas Laporan BPK	Skala	-	-	100,00%
29	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	73	-	98,90%
30	Indeks Transparansi	Poin	73	115,90%	-
31	Nilai SPBE	Poin	3,01	94,10%	161,98%
32	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	2,85	-	111,69%
33	Indeks Desa Membangun	Poin	-	-	-
34	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	-	-	-
35	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	%	75,95	-	-
36	Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi Baik	%	82,96	-	-
37	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	%	-	-	-
38	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Persampahan sesuai Jakstrada	%	33,03	-	-
39	Persentase pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik	%	47,85	-	-
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	61,79	-	70,27%
41	Indeks Resiko Bencana	Poin	160,45	138	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pamekasan	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6
42	Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah sesuai RTRW.	%	98	-	70,27
43	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	81,31	-	-
44	Persentase Partai Politik dan LSM Aktif	%	90	-	-
45	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani.	%	100	-	-
46	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	-	-
47	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/dilestarikan	%	67	-	-
48	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	86,17	91,07	91,06%
49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	-	-	-
50	Jumlah Pemuda Berprestasi	orang	118	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan 2021, Jawa Timur dalam Angka 2021 & BPS Nasional

Berdasarkan data pada tabel 3.46 di atas, yakni perbandingan antara capaian Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional diketahui bahwa capaian rata-rata pada setiap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pamekasan terlihat lebih rendah dibandingkan capaian indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur. Begitupun dengan Indikator Kinerja Utama Nasional, dimana capaian Indikator Kinerja Utama Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Provinsi. Akan tetapi masih terdapat data Indikator capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional masih belum diketahui.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.47 Realisasi Anggaran

Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Anggaran 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan Kualitas Sumber	424.272.225.384,00	300.334.375.494,20	70,79%

Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Anggaran 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan			
Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	144.174.576.597,00	77.067.122.276,60	53,45%
Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	280.097.648.787,00	223.267.253.217,60	79,71%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Sektor Pertanian, didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan	459.754.892.276	326.645.762.250	71,05%
Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	24.893.575.882	21.613.390.207	86,82%
Stabilitas, Ketersediaan, dan Mutu Pangan Daerah	428.710.608.894,00	300.334.375.495,15	70,06%
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6.150.707.500,00	4.697.996.548,00	76,38%
Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro	21.136.042.100,00	14.827.202.856,00	70,15%
Penyerapan Tenaga Kerja	3.743.625.000,00	3.262.371.175,00	87,14%
Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha	9.194.047.600,00	7.277.757.930,00	79,16%
Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat	3.537.345.000,00	3.372.861.010,00	95,35%
Iklm Investasi yang Inklusif	4.661.024.500	914.212.741	19,61%
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	6.414.873.000	5.828.490.995	90,85%
Sumber-Sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah	6.414.873.000	5.828.490.995	90,85%
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	128.132.179.403,00	92.451.838.074,00	72,15%
Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	90.070.304.921	56.162.827.700	62,35%
Tata Kelola Pemerintah Desa	38.061.874.482	36.289.010.374	95,34%

Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Anggaran 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
yang Baik			
Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak Bagi Masyarakat	483.265.437.320,00	343.279.051.934,00	71,03%
Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	456.429.166.218	318.774.727.302	69,84%
Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu, dan Tangguh Bencana	26.836.271.102	24.504.324.632	91,31%
Meningkatkan Harmonisasi Sosial Melalui Optimalisasi Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam Pembangunan	12.058.244.300	10.574.081.657	87,69%
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik	4.168.542.300	3.617.102.112	86,77%
Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan	-	-	-
Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	7.889.702.000	6.956.979.545	88,17%
Rata-rata capaian anggaran	1.535.033.893.783,00	1.093.940.803.260,35	71,26%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian anggaran tahun 2020 mencapai 71,26%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 1.093.940.803.260,35 dari jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar 1.535.033.893.783,00. Secara rinci, pada tujuan 1 capaian anggarannya mencapai 70,79%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 300.334.375.494,20 dari jumlah anggaran sebesar 424.272.225.384,00. Pada tujuan 2, capaian anggarannya adalah sebesar 71,05, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 326.645.762.250,00 dari jumlah anggaran sebesar 459.754.892.276,00. Pada tujuan 3, capaian anggarannya adalah sebesar 70,15%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 14.827.202.856,00 dari jumlah anggaran sebesar 21.136.042.100,00. Pada

tujuan 4, capaian anggarannya adalah sebesar 90,85%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 5.828.490.995,00 dari jumlah anggaran sebesar 6.414.873.000,00. Pada tujuan 5, capaian anggarannya adalah sebesar 72,15%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 92.451.838.074,00 dari jumlah anggaran sebesar 128.132.179.403,00. Pada tujuan 6, capaian anggarannya adalah sebesar 71,03%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 343.279.051.934,00 dari jumlah anggaran sebesar 483.265.437.320,00. Pada tujuan 7, capaian anggarannya adalah sebesar 87,69%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar 10.574.081.657,00 dari jumlah anggaran sebesar 12.058.244.300,00.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.48 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran Strategis	Nilai Efisiensi		
	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Nilai Efisiensi
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan	101,07%	70,79%	30,28%
Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	105,53%	53,45%	52,08%
Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	96,05%	79,71%	16,34%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Sektor Pertanian, didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan	44,52%	71,05%	-26,53
Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah	97,01%	86,82%	10,19%
Stabilitas, Ketersediaan, dan Mutu	85,58%	70,06%	15,52%

Tujuan/Sasaran Strategis	Nilai Efisiensi		
	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Nilai Efisiensi
Pangan Daerah			
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	96,69%	76,38%	20,31%
Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro	68,30%	70,15%	-1,85%
Penyerapan Tenaga Kerja	72,35%	87,14%	-14,79%
Perkembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha	515,81%	79,16%	436,65%
Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat	360%	95,35%	264,65%
Iklim Investasi yang Inklusif	128,48%	19,61%	108,87%
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	115,73%	90,85%	24,88%
Sumber-Sumber Fundamental Penerimaan Daerah yang Mendukung Kapasitas Fiskal Daerah	4707,87%	90,85%	4617,02%
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	-	72,15%	-
Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	-	62,35%	-
Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik		95,34%	
Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak Bagi Masyarakat	-	71,03%	-
Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	-	69,84%	-
Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu, dan Tangguh Bencana	120,67%	91,31%	29,36%
Meningkatkan Harmonisasi Sosial Melalui Optimalisasi Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam Pembangunan	109,05%	87,69%	21,36%
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib, dan Partisipasi Politik Masyarakat yang	112,32%	86,77%	25,55%

Tujuan/Sasaran Strategis	Nilai Efisiensi		
	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Nilai Efisiensi
Baik			
Nilai Keagamaan, Budaya, dan Tradisi Lokal Sebagai Bagian Penting Pembangunan	223,33%	-	223,33%
Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	-	88,17%	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Pamekasan yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap Pencapaian Indikator, Sasaran Strategis, dan Capaian Misi. Penyusunan LKjIP juga merupakan sebuah pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan yaitu **“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”** sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan 2018-2023. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 5 misi yakni :

- Pertama** Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Kedua** Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, dan Sektor Potensial Lainnya.
- Ketiga** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Keempat** Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan.

Kelima Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyusun RKPD yang berisi usulan strategi dan program/kegiatan dengan mengacu pada indikator dan target mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan mengacu pada IKU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 50 (lima puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa 32 Indikator Atau sebesar 64% kategori sangat berhasil, indikator dengan kategori berhasil sebanyak 5 indikator atau sebesar 10%. Sedangkan pada kategori cukup berhasil terdapat 2 indikator atau 4%. Dan terdapat 1 indikator atau 2% dengan kategori tidak berhasil. Berdasarkan pengukuran terhadap 5 (lima) Misi dan 17 (tujuh belas) sasaran terdapat 1 (satu) indikator tidak berhasil.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2020, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan terus selalu mengupayakan terjadinya percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar target akhir RPJMD di 2023 dapat tercapai. Dengan tercapainya target akhir di RPJMD nantinya, diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan visi dan misi yang telah tertuang pada periode tersebut.

Koordinasi dan sinkronisasi akan terus dilakukan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus dapat bersinergi dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4.2 TINDAK LANJUT

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direfleksikan ke berbagai daerah;
2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
3. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan;
4. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama setiap Perangkat Daerah dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Pamekasan, 30 Maret 2021

BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pamekasan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dengan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (<i>long and healthy life</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan standar hidup layak (<i>element standard of living</i>). Tahun 2010 terjadi perubahan formula IPM, yang dibentuk dari 3 variabel, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harapan hidup saat lahir (dasar Indeks Kesehatan), $I_{kesehatan} = \frac{AMH - AMH_{min}}{AMH_{maks} - AMH_{min}}$ <ol style="list-style-type: none"> Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (dasar Indeks Pendidikan), $I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{RLS}}{2}$ <ol style="list-style-type: none"> Pengeluaran perkapita (dasar Indeks Pengeluaran) $I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$ <p>Maka, formula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	BPS	BAPPKPA
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Prosentase Pertumbuhan Ekonomi	$R_{t-1, t} = (PDB_t - PDB_{t-1}) / PDB_{t-1} \times 100\%$ <p>R = tingkat pertumbuhan ekonomi dlm satuan persentase (%) PDB_t = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t. PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya.</p>	BPS	BAPPKPA
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	<p>Rasio Gini indikator kesejahteraan yang diukur dari distribusi pendapatan (ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan) pada suatu wilayah. Struktur pendapatan rumah tangga contoh pada masing-masing wilayah agro-ekosistem terdiri atas: (1) pendapatan dari usaha tani (<i>on-farm income</i>) pada lahan garapan, (2) pendapatan dari buruh tani atau jasa pertanian lainnya (<i>off-farm income</i>), dan (3) pendapatan dari luar sektor pertanian (<i>nonagricultural income</i>) (FAO, 1993).</p> <p>Kategori: X = 0 maka Merata Seperangkat 0 < X < 0,4 = Tingkat Ketimpangan Rendah 0,4 < X < 0,5 = Tingkat Ketimpangan Sedang 0,5 < X < 1 = Tingkat Ketimpangan Tinggi X = 1 Tidak Merata (diklasifikasi pihak tertentu)</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_i \times (F_i + F_{i-1})$ <p>GR: koefisien gini Fi: frekuensi penduduk dalam kelas pengaliran ke-i Fi-1: akumulasi kumulatif dari total pengaliran dalam kelas pengaliran ke-i Fi-1: akumulasi kumulatif dari total pengaliran dalam total pengaliran ke (i-1)</p>	BPS	DMPEDA

<p>Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Mutu yang Efektif dan Akuntabel</p>	<p>Indeks Kinerja Birokrasi</p>	<p>Indeks yang dihasilkan dari pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan Instruksi Mendagri No. 10/2014 tentang Monev dan No. 1/2014 tentang Indikator Indeks BI:</p> <table border="1" data-bbox="638 364 1044 593"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>> 90 - 100</td> <td>Ekstrem</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Berprestasi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>> 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Baik, perlu sedikit pembaikan (tidak sempurna), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>> 50 - 60</td> <td>Kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>> 40 - 50</td> <td>Sangat kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>> 0 - 30</td> <td>Sangat kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	> 90 - 100	Ekstrem	2.	A	> 80 - 90	Berprestasi	3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit pembaikan (tidak sempurna), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak	5.	CC	> 50 - 60	Kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak	6.	C	> 40 - 50	Sangat kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak	7.	D	> 0 - 30	Sangat kurang	<p>BB</p>	<p>DAFTAR</p>
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																	
1.	AA	> 90 - 100	Ekstrem																																	
2.	A	> 80 - 90	Berprestasi																																	
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik																																	
4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit pembaikan (tidak sempurna), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak																																	
5.	CC	> 50 - 60	Kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak																																	
6.	C	> 40 - 50	Sangat kurang, perlu banyak sedikit perbaikan & perubahan yang sangat mendesak																																	
7.	D	> 0 - 30	Sangat kurang																																	
<p>Menjaga Terpeliharanya, pemeliharaan, dan lingkungan hidup yang layak bagi Masyarakat</p>	<p>Indeks Pembangunan Infrastruktur</p>	<p>Adalah nilai rata-rata capaian kinerja pemeliharaan ketahanan infrastruktur daerah yang terdiri dari infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air (irigasi), infrastruktur perumahan dan infrastruktur kesehatan dan Sumber Daya Manusia dan Pemukiman (PMD) dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>(% Infrastruktur Jalan dan jembatan dalam kondisi baik + % infrastruktur sumber daya air (irigasi) berfungsi baik + % Infrastruktur Perumahan dalam kondisi berfungsi baik + % Perumahan dan Sumber Daya Manusia (PMD) pemukiman dalam kondisi baik + % Pemukiman Pradua Perumahan Jalan Kondisi Baik) / 5</p>	<p>BB</p>	<p>DAFTAR</p>																																

	<p>Prosentase Penduduk Miskin</p>	$R_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^c \left \frac{x_j - y_j}{2} \right ^2$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> R_k = Persentase penduduk miskin (head count index) z = Garis kemiskinan y_j = Rata-rata pendapatan perkapita seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($j = 1, 2, 3, \dots, q$); $y_0 = z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk <p>Angka yang ditunjukkan oleh RCI/PO menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.</p>	<p>BB</p>	<p>DAFTAR</p>
<p>Pelaksanaan Layanan Kerja Melalui Pengembangan Instansi Kerja, Komunitas dan Usaha Mikro</p>	<p>Tingkat pengangguran terbuka (TPT)</p>	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah tenaga produktif usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran dan diadukan sebagai acuan pemerintah bagi pelaksanaan kegiatan kerja baru.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka diukur dari persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:</p> <p>TPT = (Penganggur / Angkatan Kerja) x 100%</p>	<p>BB</p>	<p>DAFTAR</p>

<p>Meningkatkan Harmoni Nila-Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepedulian, dan Persepsi dalam Pembangunan</p>	<p>Indeks Keselamatan Sosial</p>	<p>Adalah nilai skor average yang menilai suatu ketahanan (positif atau negatif) dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selamatan sosial; Toleransi; Kepercayaan/kegotongroyongan; Tengah-tengah; dan Stabilitas. <p>Pendataan/survey indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif instrumen kuantitatif terstruktur dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik sampling berstrata, Stratified Random Sampling dan wawancara dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Margin of Error 2,9%.</p>	<p>BB</p>	<p>DAFTAR</p>
---	----------------------------------	--	-----------	---------------

DUPATI PAMEKASAN,

 BACCURT TAMAM

2. Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Pamekasan Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IL DINDIKY TAMAM, S.Pd**
 Jabatan : **Kepala Pemerintah**

Berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebagaimana tercantum lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Ketberhasilan dan kapabilitas pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pamekasan, 31 Januari 2020
 IL DINDIKY TAMAM, S.Pd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN PAMEKASAN

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Perbaikan Memerintat yang Berkualitas dan Berkas	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
2	Asesmen, Pengukuran, dan Evaluasi dan Monev dan Inspeksi	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
3	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
4	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
5	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
6	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
7	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
8	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
9	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
10	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Perbaikan Memerintat yang Berkualitas dan Berkas	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
2	Asesmen, Pengukuran, dan Evaluasi dan Monev dan Inspeksi	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
3	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
4	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
5	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
6	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
7	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
8	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
9	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
10	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Perbaikan Memerintat yang Berkualitas dan Berkas	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
2	Asesmen, Pengukuran, dan Evaluasi dan Monev dan Inspeksi	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
3	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
4	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
5	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
6	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
7	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
8	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
9	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00
10	Perbaikan Pelayanan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Keluasan 2. Indeks Mutu Desa Desa	90 90,00



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan